



## **KATA PENGANTAR**

Dengan berkat lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) ini disusun sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018.

Untuk memenuhi hal tersebut diatas, Rencana Kerja Perubahan ini disusun dengan mengacu kepada analisis kondisi dan potensi Dinas Sosial Daerah serta hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Kerja tahun berjalan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 ini, kami ucapkan terima kasih.

Sapiro, 31 Juli 2018

KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

dto

Drs. NURDIN PANE  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620518 198203 1 001





## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	11
1.4 Sistematika Penulisan .....	12
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .....	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu .....	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	33
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .....	56
2.4 Review Terhadap RKPD Perubahan 2018 .....	69
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....	79
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	80
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	80
3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi .....	83
3.3 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	90
3.4 Program dan Kegiatan .....	91
BAB IV PENUTUP .....	119
LAMPIRAN .....	120



## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1.1 Pengukuran Kinerja Utama Dinas Sosial Daerah .....	20
Tabel 2.1.2 Pengukuran Kinerja Program Dinas Sosial Daerah .....	21
Tabel 2.1.3 Rekapitulasi Evaluasi dan Capaian Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Daerah .....	23
Tabel 2.2.1 Panti Sosial di Kabupaten Tapanuli Selatan .....	34
Tabel 2.2.2 PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial .....	35
Tabel 2.2.3 Laju Pertumbuhan PMKS .....	35
Tabel 2.2.4 Rekapitulasi Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial .....	37
Tabel 2.2.5 Daftar TKSK, Pendamping PKH, Pendamping Aslut, Pendamping ASODK Berat, dan Peksos .....	40
Tabel 2.2.6 Daftar Karang Taruna Menurut Kecamatan .....	46
Tabel 2.2.7 Daftar Penerima Bantuan ASODK Berat, Aslut dan Penyakit Kejiwaan .....	47
Tabel 2.2.8 Indikator Kemiskinan Kabupaten Tapanuli Selatan .....	48
Tabel 2.2.9 Daftar BDT Kesejahteraan Sosial, KKS, PBI dan Dapodik .....	49
Table 2.2.10 Jumlah Peserta BPJS di Kabupaten Tapanuli Selatan .....	51
Tabel 2.2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Daerah .....	53
Tabel 2.3.1 Daftar Pegawai dan THL, Status, Serta Jabatan .....	63
Tabel 2.3.2 Daftar Barang Inventaris Dinas Sosial Daerah.....	64
Tabel 2.3.3 Daftar Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan Struktural .....	65



Tabel 2.4.1	Review Terhadap Rencana Strategis OPD .....	70
Tabel 3.2.1	Pembagian Wewenang Bidang Sosial .....	87
Tabel 3.4.1	Perubahan Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	97
Tabel 3.4.2	Rumusan Rencana Program Kegiatan Dinas Sosial Daerah ..	109
Tabel 3.4.3	Indikator Kinerja Utama .....	118



## DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1. Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sumber Dana APBN Tahun 2018 .....	121
Lampiran 2. Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 .....	124
Lampiran 3. Usulan Program Kegiatan Sumber Dana APBN Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2019 Melalui Aplikasi Simlaras .....	130
Lampiran 4. Usulan Program Kegiatan Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2019 Melalui Aplikasi Simlaras .....	134
Lampiran 3. Rekapitulasi Usulan Program Kegiatan Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 .....	137



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Daerah adalah dokumen resmi perencanaan tahunan Dinas Sosial Daerah memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang memiliki fungsi sangat penting dalam sistem perencanaan daerah disusun didasarkan atas Rencana Strategis Dinas Sosial Daerah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021.

Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2018 dilakukan Renja Perubahan Dinas Sosial Daerah Tahun 2018. Adapun alasan yang mendasar dilakukan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Daerah Tahun 2018 hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Sosial daerah Tahun 2016, 2017, dan kondisi triwulan II pada tahun 2018, dengan prinsip sebagai berikut :

- a. Rumusan Program dan Kegiatan di dalam Renja Perubahan ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang telah kami sepakati bersama sesuai tugas fungsi kewenangan Dinas Sosial Daerah dengan mempertimbangkan pagu indikatif;
- b. Adanya pergeseran-pergeseran antar kegiatan, program kegiatan, penambahan target kinerja, dan kelompok sasaran;
- c. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 berpedoman pada Renstra Dinas Sosial Daerah 2016-2021;



- d. Renja Perubahan ini disusun atas dasar Renstra Dinas Sosial Daerah Tahun 2016-2021 yang telah memasuki Tahap III dengan memperhatikan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang mekanisme dan tata cara penyusunannya berpedoman kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan dokumen Perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial Daerah dengan dorongan serta peran aktif masyarakat untuk tahun 2018.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) ini disusun untuk menjamin kesinambungan dan konsistensi bidang sosial yang akan dicapai di tahun 2018. Renja Perubahan juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.



Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tapanuli Selatan telah memberikan warna dan kontribusi secara nyata dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui upaya penanganan untuk meminimalisir menambahnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan bantuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Untuk mencapai tujuan organisasi, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam setiap langkah/kegiatan operasi organisasi. Perencanaan mengarahkan organisasi bergerak sesuai dengan arah dan tujuan yang dikehendaki oleh organisasi. Selain dari pada itu perencanaan juga menjadi pedoman untuk keberhasilan dari kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu perencanaan harus disusun secara cermat dengan memperhatikan situasi kondisi yang berkembang saat ini dan perkiraan kondisi yang akan datang sehingga perencanaan tidak saja mampu menjawab permasalahan saat ini akan tetapi juga mampu menjawab permasalahan ke depan.

Dalam kehidupan organisasi bernegara, perencanaan menjadi salah satu kewajiban nasional yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi publik/pemerintahan pada semua level organisasi. Kewajiban tersebut tertera dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan.



Selanjutnya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya diperbuat Rencana Kerja setiap tahun sebagai arah untuk melaksanakan kegiatan dengan target yang akan dicapai dengan memperhatikan kondisi Sumber daya yang dimiliki untuk dapat dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja dengan kewenangan otonomi daerah yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam perjalanan pelaksanaan pembangunan Kesejahteraan Sosial, berbagai masalah dan tantangan dalam pembangunan telah berkembang semakin berat dan kompleks dan kadang-kadang tidak terduga. Dalam upaya menanggulangi masalah Sosial terutama warga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dalam menghadapi tantangan dimaksud, juga telah ditata kembali organisasi dan sistem kerjanya. Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 93 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.



Peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan di daerah sangat berbeda, ini ditentukan oleh hal-hal yang menjadi karakteristik daerah tersebut. Perbedaan selalu ada pada setiap daerah baik perbedaan kualitas sumber daya manusia maupun sumber daya alam (dalam hal ini potensi daerah). Perbedaan ini menuntut Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki pertimbangan tersendiri dalam menyusun rencana pembangunan daerah bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Proses penyusunan Renja Perubahan ini dimulai dengan usulan dari setiap bidang dan juga dari Sekretariat Dinas, selanjutnya dilakukan analisis gambaran pelayanan Dinas Sosial Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja pada triwulan II serta mengacu pada Renstra Dinas Sosial Daerah yang didasarkan pada penelaahan RKPD Perubahan Tahun 2018.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dilakukan berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembar Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 95);
28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015-2019;
29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Pekerja Sosial;
30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;



33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 18);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021;
35. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279);
36. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
37. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program Dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
38. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021;
39. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 93 Tahun 2016 tentang Uraian tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
40. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018;
41. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.45/560/KPTS/Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018.



### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan arahan dan sekaligus acuan bagi Dinas Sosial Daerah dalam melaksanakan tugas tahunan mewujudkan visi misi lima tahun ke depan;
- b. Landasan kebijakan pembangunan selama satu tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program serta sebagai tolak ukur pertanggungjawaban pelaksanaan selama satu tahun.

Adapun tujuan rencana kerja perubahan tahun 2018 adalah :

1. Memaksimalkan dan melaksanakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai 01 Januari 2018 dan berakhir pada 31 Desember 2018 yang menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Dinas Sosial Daerah
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan perubahan anggaran Dinas Sosial Daerah sehingga dapat lebih terarah dan terukur, tepat waktu, bermutu dan tepat sasaran;



#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Sosial Daerah Tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap RKPD Perubahan Tahun 2018
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi
- 3.3 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.4 Program dan Kegiatan

##### **BAB IV PENUTUP**

##### **LAMPIRAN**



## BAB II EVALUASI RENJA TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun Lalu

Rencana Strategis Dinas Sosial Daerah Tahun 2016-2021 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Daerah) yang merupakan kerangka pembangunan strategis Kabupaten Tapanuli Selatan untuk periode 2016-2021 dengan muatan visi, misi dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

#### a. Visi

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021, merupakan bagian yang tidak terlepas dari upaya pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2005-2025, yakni :

**“Tapanuli Selatan Yang Maju, Adil Berlandaskan Agama dan Adat Budaya”**

Berdasarkan kondisi Kabupaten Tapanuli Selatan sekarang ini, peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi, maka pasangan H. Syahrul M. Pasaribu, SH (Bupati) dan H. Ir. Aswin Efendi Siregar, MM (Wakil Bupati) membuat visi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

**“Tapanuli Selatan yang Maju Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangun yang Unggul, Sehat, Cerdas, Sejahtera, serta Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari”.**



b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan terpilih, maka dirumuskanlah misi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ);
2. Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan lingkungan;
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya di daerah dan pemerintah atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitasi sosial dan umum masyarakat;
4. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik, bersih, dan berwibawa;
5. Meningkatkan standar hidup layak, keamanan, dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terwujudnya kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ).



- Sasaran : 1. Terwujudnya perilaku masyarakat yang religius dan berbudaya serta rukun antar suku dan umat beragama;
2. Meningkatnya angka partisipasi dan lama bersekolah, kualitas lulusan pendidikan dasar dan kurangnya angka putus sekolah;
3. Meningkatnya angka usia harapan hidup, angka kelangsungan hidup bayi, menurunnya angka kematian ibu melahirkan, dan gizi buruk serta terkendalinya laju pertumbuhan penduduk;
4. Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kompetensi dan daya saing masyarakat.
- Tujuan 2 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan lingkungan.
- Sasaran : 1. Meningkatnya pendapatan produktivitas masyarakat;
2. Meningkatnya jumlah penduduk di atas garis garis kemiskinan dan menurunnya tingkat pengangguran terbuka;
3. Terjaminnya ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan strategis lainnya dengan harga yang terjangkau masyarakat;
4. Terjaminnya pemasaran produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, perkebunan, peternakan dan industri.
- Tujuan 3 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat.



- Sasaran : 1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana perkantoran, jalan, sumber daya air dan irigasi, air minum dan pelayanan umum lainnya;
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat serta tertatanya kawasan pemukiman kumuh;
3. Terselenggaranya penataan ruang daerah;
4. Terwujudnya pengendalian lingkungan hidup serta meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana.
- Tujuan 4 : Terwujudnya tata kelola pemerintah daerah dan desa yang baik, bersih dan berwibawa
- Sasaran : 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan pelayanan umum sesuai dengan Standar Pelayanan Umum;
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintahan desa;
3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bersih dan berwibawa;
4. Terwujudnya percepatan pembangunan antar sektor, wilayah dan pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara serta meningkatnya kehidupan berdemokrasi.
- Tujuan 5 : Terwujudnya kualitas standar hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- Sasaran : 1. Terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan perumahan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat;
2. Berkurangnya angka kriminalitas dan penyakit masyarakat lainnya;
3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016, dan uraian tugas dan fungsi serta tata cara kerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 93 Tahun 2016.

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan yang berkaitan dengan Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu :

1. Misi 2 : Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan lingkungan.  
  
Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan lingkungan.  
  
Sasaran :
  - a. Meningkatkan pendapatan produktivitas masyarakat;
  - b. Meningkatkan jumlah penduduk di atas garis kemiskinan dan menurunkannya tingkat pengangguran terbuka;
  - c. Terjaminnya ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan strategis lainnya dengan harga yang terjangkau masyarakat;
  - d. Terjaminnya pemasaran produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan, perkebunan, peternakan, dan industri.



2. Misi 5 : Meningkatnya standar hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.

Tujuan : Terwujudnya kualitas standar hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sasaran : a. Terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan perumahan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat;  
b. Berkurangnya angka kriminalitas dan penyakit masyarakat lainnya.

Untuk mencapai Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut diatas dan yang berkaitan dengan kewenangan, tugas dan fungsi maka Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki misi dan tujuan sebagai berikut :

Misi Dinas Sosial Daerah adalah :

1. Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat.

Tujuan Dinas Sosial Daerah adalah :

1. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia Dinas Sosial Daerah;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, kelompok, dan komunitas masyarakat.

Adapun yang menjadi prioritas untuk mencapai tujuan Dinas Sosial daerah adalah :

1. Peningkatan dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pelayanan publik;
2. Pemenuhan kebutuhan standar hidup layak bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani untuk meningkatkan kualitas hidupnya.



Sasaran organisasi perangkat daerah Dinas Sosial Daerah adalah :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia;
2. Terwujudnya standar hidup layak bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
3. Meningkatnya kualitas hidup layak penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani.

Strategi yang dilakukan untuk memenuhi sasaran Dinas Sosial Daerah adalah :

1. Mendorong dan memfasilitasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
2. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan pendapatan masyarakat yang berpenghasilan rendah;
3. Menurunkan angka penyandang masalah-masalah kesejahteraan sosial;
4. Menumbuhkembangkan lembaga dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Sedangkan arah kebijakan yang dilakukan untuk memperkuat strategi Dinas Sosial Daerah adalah :

1. Memberlakukan kebijakan-kebijakan teknis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
2. Memberlakukan kebijakan-kebijakan teknis yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat;
3. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial serta pemberdayaan terhadap masyarakat penyandang masalah-masalah kesejahteraan sosial;
4. Mendorong dan memfasilitasi lembaga-lembaga dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pengukuran Kinerja Utama Dinas Sosial Daerah didasarkan pada sasaran sebagai berikut :



Tabel 2.1.1  
Pengukuran Kinerja Utama Dinas Sosial Daerah Tahun 2018

Misi	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi per Juni 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia organisasi perangkat daerah Dinas Sosial Daerah	Cakupan pelayanan administrasi sosial kemasyarakatan (%)	65%	20%
Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat	a. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	93,29%	91,09%
	b. Sarana sosial panti asuhan (unit)	4 Unit	4 Unit
	c. Sarana sosial panti jompo (unit)	4 Unit	4 Unit
	d. Persentase penanganan PMKS (%)	54%	50,46 %

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Sosial Daerah tahun 2017 merupakan salah satu bagian dalam tahapan penyusunan rencana kerja perubahan tahun 2018. Bahan evaluasi yang dilakukan berupa pelaksanaan program kegiatan di tahun 2017, seperti sarana sosial, jumlah PMKS yang menerima bantuan, laju pertumbuhan PMKS, jumlah penduduk miskin, serta realisasi anggaran.



Tabel 2.1.2  
Pengukuran Kinerja Program Dinas Sosial Daerah Tahun 2018

Misi	Program	Indikator	Target	Realisasi per Juni 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan kualitas sumberdaya manusia organisasi perangkat daerah Dinas Sosial Daerah		Cakupan pelayanan administrasi sosial kemasyarakatan (%)	65%	20%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	100%	42,83%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terselenggaranya peningkatan prasarana dan sarana aparatur	100%	24,75%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	20 Orang	0 Orang
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya kewajiban pelaporan kinerja SKPD	100%	30%
Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat		a. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	93,29%	91,09%
		b. Sarana sosial panti asuhan (unit)	4 Unit	4 Unit
		c. Sarana sosial panti jompo (unit)	4 Unit	4 Unit
		d. Persentase penanganan PMKS (%)	54%	50,46%
	Program Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Pesentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	93,29%	91,09%
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial (%)	37%	0%
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penanganan para penyandang cacat dan trauma (%)	24%	0%



Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Sarana sosial panti asuhan (Unit) Sarana sosial panti jompo (Unit)	4 Unit 4 Unit	4 Unit 4 Unit
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase penanganan eks penyandang penyakit sosial (%)	24%	32,26%
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah karang taruna yang telah dibina	3 Karang Taruna	0 Karang Taruna

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1.3 berikut ini :





1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor (Bulan)	60	0	12	12	100	12	18	30.00	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen alat-alat listrik (Bulan)	60	0	12	12	100	12	18	30.00	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor (Bulan)	60	0	12	12	100	12	18	30.00	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar kantor/majalah dinas (Bulan)	60	0	12	12	100	12	18	30.00	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat kantor (Kotak)	5861	0	1209	1209	100	300	100	1.71	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (OH)	1150	0	300	300	100	233	438	38.09	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (OH)	1320	0	420	420	100	317	548	41.52	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya pelayanan jasa THL 6 orang, pejabat pengadaan barang jasa 1 orang, tim penerima hasil pekerjaan 3 orang, bendahara pengeluaran 1 orang, bendahara pembantu juru bayar 1 orang, bendahara pembantu pembukuan 1 orang, pembantu pengurus barang pengguna 1 orang (%)	100	0	100	95.99	95.99	100	48.66	48.66	



1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)	100	0	100	92.64	92.64	100	58.70	58.70
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional (Unit)	14	0	3	3	100	1	3	21.43
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (unit)	11	0	0	0	0	3	1	9.09
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (unit)	39	0	0	0	0	8	8	20.51
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Pengadaan Meubelair	Tersedianya meubelair kantor (unit)	21	0	0	0	0	7	7	33.33
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	11 Paket = 62 unit = Brankas 1 Unit, Lemari kabinet 1 unit, Filling kabinet 8 unit, laptop 12 unit, printer 7 unit, kursi kerja 26 unit, kamera EOS 1 unit, proyektor 1 unit, sound system 1 unit, TV LED 2 unit, kulkas 2 unit	62	0	62	62	100	0	62	100.00
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional (Bulan)	60	0	12	12	100	12	18	30.00
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor (Bulan)	48	0	0	0	0	12	6	12.50
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional	Telah diperbaikinya kendaraan dinas/ operasional (Unit)	3	0	1	1	100	1	1	33.33
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Fungsional (Orang)	165	0	5	5	100	20	5	3.03



1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	165	0	5	5	100	2	5	3.03	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>88.09</b>	<b>88.09</b>	<b>100</b>	<b>44.045</b>	<b>44.05</b>	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD, lakip, laporan keuangan akhir tahun, renja, perubahan renja, RKA, Perubahan RKA, revisi renstra 2016-2021, ranwal renstra 2022-2026 (Dokumen)	28	0	6	6	100	6	8	28.57	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun serta laporan penerimaan dan pengeluaran Dinas (Dokumen)	8	0	0	0	0	2	0	-	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	<b>Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Kemasyarakatan</b>	<b>Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>100.00</b>	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Peringatan HUT Tapanuli Selatan	Terselenggaranya pameran pembangunan OPD Dinas dalam rangka HUT Tapanuli Selatan (kali)	5	0	1	1	100	0	1	20.00	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	<b>Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)</b>	<b>94.28</b>	<b>0</b>	<b>92.97</b>	<b>100</b>	<b>107.56</b>	<b>93.29</b>	<b>95.55</b>	<b>101.34</b>	





1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Terselenggaranya pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS serta fasilitasi konsultasi bagi keluarga pada LK3 (orang)	315	0	0	0	0	50	0	-	
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Meningkatnya perencanaan, pemutakhiran data, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi, serta penanganan pengaduan bantuan sosial rastra (%)	80	0	0	0	0	70	0	-	
1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	Pembinaan/ monitoring Program Keluarga Harapan	jumlah keluarga penerima manfaat yang termonitoring pada PKH (orang)	360	0	60	60	100	60	80	22.22	
1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	Pelatihan Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Jumlah peserta pelatihan taruna siaga bencana (orang)	74	0	14	14	100	15	14	18.92	
1	0	0	1	0	0	0	0	1		<b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</b>	<b>Persentase Penanganan para penyandang cacat dan trauma ( %)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>36.67</b>	
											Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	0.35	0	0	0	0	0.31	0	-	
											Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh Petugas Terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu (P2TP2A) (%)	100	0	0	0	0	100	0	-	
											Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	94.28	0	92.97	100	107.56	93.29	95.55	101.34	



1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan	Tersusunnya dokumen penyandang cacat dan penyakit kejiwaan (Dokumen)	5	0	1	1	100	1	1	20.00	
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Jumlah peserta pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma (orang)	60	0	0	0	0	15	0	-	
1	0	0	1	0	0	0	0	1		<b>Program pembinaan panti asuhan/ jompo</b>										
											<b>Sarana sosial panti asuhan (unit)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>40.00</b>	
											<b>Sarana sosial panti jompo (unit)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>40.00</b>	
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo	Jumlah penghuni panti yang menjadi peserta pelatihan (orang)	120	0	0	0	0	30	0	-	
1	0	0	1	0	0	0	0	2		<b>Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)</b>	<b>Persentase penanganan eks penyandang penyakit sosial (%)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>10.75</b>	<b>35.84</b>	
											<b>Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)</b>	<b>94.28</b>	<b>0</b>	<b>92.97</b>	<b>100</b>	<b>107.56</b>	<b>93.29</b>	<b>95.55</b>	<b>101.34</b>	
1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya sosialisasi dan pemutakhiran data-data sosial, pembangunan aplikasi sistem data terpadu kesejahteraan sosial, pembangunan website serta dokumen profil PMKS di Kab. Tapanuli Selatan (%)	100	0	0	0	0	70	0	-	



1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah karang taruna yang telah dibina	18	0	3	3	100	3	3	16.67	
											Cakupan pelayanan administrasi sosial kemasyarakatan (%)	75	0	63.33	65.60	103.58	65	42.8	57.07	
											Peresentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	94.28	0	92.97	100	107.56	93.29	95.55	101.34	
											Persentase penyelesaian konflik (%)	90	0	100	100	100	80	50	55.56	
1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Tersedianya dokumen kerjasama antara pelaku usaha dengan LK3, pusat bimbingan konseling, dan panti asuhan/jompo (Kerjasama)	24	0	0	0	0	6	0	-	
1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM kesejahteraan sosial dan organisasi masyarakat yang mendapat bantuan fasilitasi usaha (orang)	420	0	0	0	0	0	0	-	
1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	Penanganan konflik sosial	Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM TKSK dan penanganan kasus di LK3 (orang)	150	0	30	21	68.97	0	21	14.00	
1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	Pelestarian nilai - nilai kesetiakawanan	Terlestariannya nilai kepahlawanan, keperintisan masyarakat (Kali)	5	0	0	0	0	1	0	-	



Penjelasan dari Tabel 2.1.3 diatas adalah sebagai berikut :

- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya. Capaian kinerja program ini adalah persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial triwulan II 2018 yaitu sebesar 91,09%. Program ini didukung kegiatan Peningkatan Kemampuan (*Capacity Building*) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya dengan realisasi capaian sebesar 100 orang; dan Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Tim PMKS dan Pemberian Bantua ke Panti Sosial sebanyak 8 Panti yaitu 4 unit Panti Asuhan Anak dan 4 unit Panti Jompo. Sedangkan kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin; dan Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial belum terlaksana karena masih dalam tahapan administrasi dan pendataan keluarga yang akan mengikuti pelatihan.
- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan indikator kinerja persentase PMKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial sebesar 0%. Kegiatan pendukung program ini adalah Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak dimana kegiatan ini belum terlaksana karena belum adanya informasi terkait kasus hukum terhadap korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak; Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi PMKS belum terlaksana karena masih dalam tahapan persiapan administrasi; dan Pelatihan Taruna Siaga Bencana belum terlaksana karena masih dalam tahapan administrasi. Sedangkan kegiatan Pembinaan/Monitoring PKH capaian kinerja triwulan II 2018 adalah 20 orang.



- c. Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo. Capaian kinerja program ini adalah jumlah panti asuhan anak sebanyak 4 unit panti asuhan anak dan 4 unit panti jompo. Program ini didukung kegiatan seperti Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo belum terlaksana karena kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan III.
- d. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya) dengan capaian kinerja triwulan II 2018 adalah 32,26% sebagai persentase penanganan eks penyandang penyakit sosial. Program ini didukung seperti Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan belum terlaksana, karena masih dalam tahapan persiapan administrasi seperti penyusunan kuisisioner PMKS.
- e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan capaian kinerja triwulan II 2018 adalah belum adanya karang taruna yang dibina. Program ini didukung kegiatan seperti Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat dimana pada kegiatan ini untuk membangun kerjasama antara pelaku usaha dengan lembaga kesejahteraan sosial di Kabupaten Tapanuli Selatan tetapi hingga triwulan II tahun 2018 belum ada kerjasama yang terbentuk karena pelaku usaha tersebut belum memiliki pendanaan untuk memberikan bantuan bagi lembaga kesejahteraan sosial; dan Pelestarian Nilai-Nilai Kesetiakawanan belum terlaksana karena pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2018 untuk memperingati hari kesetiakawanan sosial.



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 93 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kesejahteraan Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati Tapanuli Selatan melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai bagian yang Integral dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan akan mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021.

Visi :

**”Tapanuli Selatan yang Maju, Adil Berlandaskan Agama dan Adat Budaya”**

Misi :

**”Tapanuli Selatan yang Maju Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangun yang Unggul, Sehat, Cerdas, Sejahtera serta Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari”**

Adapun yang menjadi indikator utama Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah :

1. Cakupan pelayanan administrasi sosial kemasyarakatan  
Cakupan pelayanan administrasi sosial organisasi perangkat daerah Dinas Sosial Daerah merupakan program kegiatan rutin dengan target sebesar 65% dan realisasi per Juni 2018 sebesar 20%.
2. Sarana panti asuhan yang tersedia di Kabupaten Tapanuli Selatan  
Sarana panti asuhan yang tersedia di Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2018 sebanyak 4 unit.



3. Sarana panti jompo yang tersedia di Kabupaten Tapanuli Selatan

Sarana panti jompo yang tersedia di Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2018 sebanyak 4 unit.

4. Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial

Adapun persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial per Juni 2018 sebesar 91,09% dengan jumlah PMKS yang mendapat bantuan sosial sebanyak 18.699 orang.

5. Persentase penanganan PMKS

Persentase penanganan PMKS per Juni 2018 adalah sebesar 50,46% dengan jumlah PMKS yang mendapat penanganan sosial sebanyak 10.358 orang.

Adapun sarana sosial yang tersedia di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah panti asuhan anak dan panti sosial tresna werda/panti jompo. Panti asuhan tersebut seluruhnya dimiliki oleh pihak yayasan Sejak tahun 2011-2018 jumlah panti asuhan di Kabupaten Tapanuli Selatan dari belum ada perubahan yakni sebanyak 4 panti asuhan anak dan 4 panti asuhan jompo, seperti yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2.1  
Panti Sosial di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018

No (1)	Panti Sosial (2)	Desa/ Kecamatan (3)
<b>Panti Sosial Anak/Panti Asuhan</b>		
1	Panti Asuhan Maimun	Desa Basilam baru Kec. Batang Angkola
2	Panti Asuhan Titian Ridho Ilahi	Desa Huta Holbung Kec. Batang Angkola
3	LKS. Amalia Attohir	Desa Huta Tonga Kec. Batang Angkola
4	Al-Hijrah	Kelurahan Bintuju Kec. Batang Angkola
<b>Panti Sosial Tresna Werda/ Panti Jompo</b>		
5	Majelis Ta'lim Syech Mhd. Baqi	Desa Basilam Baru Kec. Batang Angkola
6	Jabalul Madaniyah	Desa Sijungkang Kec. Angkola Timur
7	Nurul Falah Tamosu	Desa Panompuan Kec. Angkola Timur
8	Titian Ridho Ilahi	Desa Huta Tonga Kec. Batang Angkola

Sumber : Bidang Pemberdayaan Sosial, 2018



Sedangkan jumlah PMKS di Kabupaten Tapanuli Selatan yang mendapatkan penanganan dengan memperoleh bantuan sosial selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan secara terus menerus, meskipun masih banyak yang belum menerima bantuan sosial. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran sehingga belum sepenuhnya bisa tertangani.

**Tabel 2.2.2**  
**PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial**  
**Tahun 2012 hingga Juni 2018**

Uraian	Tahun						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Per Juni 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah PMKS yang diberikan bantuan (jiwa)	20.145	23.143	23.531	27.112	26.939	20.654	18.699
Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan (jiwa)	33.770	32.380	31.894	29.370	29.370	20.654	20.527
Persentase PMKS yang Memperoleh bantuan sosial (%)	65,7	74,06	76,41	92,31	91,72	100	91,09

Sumber : Dinas Sosial Daerah, 2018

Adapun laju pertumbuhan PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Tapanuli Selatan hingga Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2.3**  
**Laju Pertumbuhan PMKS Tahun 2012- Juni 2018**

Uraian	Laju Pertumbuhan (%)							Rata-Rata Laju Pertumbuhan (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Per Juni 2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	
Jumlah PMKS yang diberikan bantuan (jiwa)	1,71	12,95	1,65	13,21	(0,64)	(30,43)	(10,48)	(1,72)
Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan (jiwa)	5,56	(4,29)	(1,52)	(8,59)	0,00	(42,20)	(0,62)	(7,38)

Sumber : Dinas Sosial Daerah, 2018



Adapun data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) menurut kategori adalah sebagai berikut :



Tabel 2.2.4  
Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2017- Juni 2018

No.	KATEGORI PMKS	SATUAN	YANG SEHARUSNYA MENDAPAT BANTUAN SOSIAL		YANG MENDAPAT BANTUAN SOSIAL			YANG MENDAPAT PENANGANAN SOSIAL				
			JUMLAH		JUMLAH			JUMLAH				
			TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2017	%	TAHUN 2018	%	TAHUN 2017	%	TAHUN 2018	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	<b>PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	Orang	20,654	20,527	20,654	100	18,699	91.09	8,226	39.83	10,358	50.46
	<b>Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</b>	Orang	<b>19,963</b>	<b>19,836</b>	<b>19,963</b>		<b>18,008</b>		<b>7,535</b>		<b>9,667</b>	
1.	Anak Jalanan	Orang	-	-	-		-		-		-	
2.	Penderita Sakit Jiwa	Orang	147	147	147		-		-		-	
3.	Gepeng (Gembel dan Pengemis)	Orang	-	-	-		-		-		-	
4.	Penderita HIV/AIDS	Orang	9	9	9		-		9		-	
5.	Pecandu Narkoba	Orang	49	49	49		-		49		-	
6.	Fakir Miskin	Orang	17,972	17,972	17,972		17,972		7,420		9,646	
7.	Bayi Terlantar	Orang	1	1	1		1		1		1	
8.	Anak Terlantar	Orang	4	-	4		-		4		-	
9.	Anak Korban Kekerasan Lingkungan Rumah Tangga	Orang	-	-	-		-		-		-	
10.	Anak Korban Kekerasan Lingkungan Sekolah	Orang	-	-	-		-		-		-	
11.	Anak Korban Kekerasan Lingkungan Masyarakat	Orang	6	-	6		-		6		-	
12.	Anak Korban Kekerasan Seksual	Orang	46	6	46		-		46		-	



13.	Lanjut Usia Terlantar	Orang	120	120	120	-	-	-
14.	Komunitas Adat Terpencil	Orang	-	-	-	-	-	-
15.	Penyandang Tuna Netra	Orang	40	40	40	-	-	-
16.	Penyandang Tuna Rungu	Orang	143	143	143	-	-	-
17.	Penyandang Tuna Wicara	Orang	34	34	34	1	-	-
18.	Penyandang Tuna Wicara - Rungu	Orang	-	-	-	-	-	-
19.	Penyandang Tuna Daksa	Orang	477	477	477	-	-	-
20.	Penyandang Tuna Grahita	Orang	-	-	-	-	-	-
21.	Penyandang Buta Aksara	Orang	-	-	-	-	-	-
22.	Penyandang Cacat Fisik dan Mental	Orang	776	776	776	14	-	-
23.	Tuna Susila	Orang	-	-	-	-	-	-
24.	Bekas Narapidana	Orang	139	-	139	-	-	-
25.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Orang	-	62	-	20	-	20
26.	Penyandang LGBT	Orang	-	-	-	-	-	-
27.	Korban LGBT	Orang	-	-	-	-	-	-
<b>Panti Asuhan/Jompo</b>								
28.	Panti Sosial Asuhan Anak							
	Jumlah Panti	Unit	4	4	4	4	4	4
	Jumlah Penghuni	Orang	505	505	505	505	505	505
	Jumlah Pekerja Sosial Profesional	Orang	2	2	2	2	2	2
	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial	Orang	14	14	14	14	14	14



---

29.	Panti Sosial Tresna Wirda							
	Jumlah Panti	Unit	4	4	4	4	4	4
	Jumlah Penghuni	Orang	186	186	186	186	186	186
	Jumlah Pekerja Sosial Profesional	Orang	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial	Orang	-	-	-	-	-	-

---

Sumber : Dinas Sosial Daerah, 2018



Dalam meningkatkan pelayanan sosial di kecamatan maka Dinas Sosial Daerah dibantu oleh TKSK, Tagana, Pendamping PKH, Pendamping Aslut, Pendamping ASODK Berat, dan Pekerja Sosial. Adapun Daftar TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan), Tagana (Taruna Siaga Bencana), Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan), Pendamping Aslut (Asistensi Lanjut Usia Terlantar), Pendamping ASODK (Asistensi Orang dengan Kecacatan) Berat, dan Pekerja Sosial (Peksos) adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2.5**  
**Daftar TKSK, Tagana, Pendamping PKH, Pendamping Aslut,**  
**Pendamping ASODK Berat, dan Peksos Tahun 2018**

No.	Kecamatan	Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) (Orang)	Taruna Siaga Bencana (Tagana) (Orang)	Pendamping PKH (Orang)	Pendamping Aslut (Orang)	Pendamping ASODK Berat (Orang)	Pekerja Sosial (Orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aek Bilah	1	-	2	-	1	-
2	Angkola Barat	1	4	6	3	1	-
3	Angkola Sangkunur	1	2	5	-	1	-
4	Angkola Selatan	1	3	9	-	1	-
5	Angkola Timur	1	1	4	3	1	-
6	Arse	1	2	2	-	1	-
7	Batang Angkola	1	2	5	4	1	-
8	Batang Toru	1	3	3	-	1	-
9	Marancar	1	3	2	-	1	-
10	Muara Batang Toru	1	3	3	-	1	-
11	Saipar Dolok Hole	1	-	5	-	1	-
12	Sayurmatangi	1	1	3	-	1	-
13	Sipirok	1	3	4	-	1	-
14	Tantom Angkola	1	1	2	-	1	-
15	Koordinator Kabupaten			1			
16	Operator Kabupaten			2			
17	Supervisor			1			
18	Kabupaten Tapanuli Selatan	-	-	-	-	-	2
<b>Total</b>		<b>14</b>	<b>28</b>	<b>64</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>2</b>

Sumber : Dinas Sosial Daerah, 2018



Tugas dan tanggungjawab Pendamping Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut :

- a. Fasilitator, yakni membantu masyarakat dan keluarga untuk menyadari, mengenali penyandang disabilitas yang ada di lingkungannya serta masalah yang dihadapi keluarga atau wali;
- b. Motivator, yakni mendorong, mengajak dan mempengaruhi keluarga/wali untuk melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalahnya;
- c. Inovator, yakni bersama masyarakat melahirkan gagasan baru yang sesuai dengan kebutuhan untuk mengatasi masalah;
- d. Mengikuti pertemuan pendamping untuk tukar menukar informasi dan berbagai pengalaman dalam melaksanakan pendampingan;
- e. Membuat laporan hasil pelaksanaan pendampingan pelaksanaan secara periodik ke Dinas/Instansi Sosial Kabupaten;
- f. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota serta aparat Desa/Kelurahan setempat;

Tugas dan tanggungjawab Pendamping Penerima Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) adalah :

- a. Bersama-sama dengan koordinator membantu dan turut bertanggungjawab terhadap kelancaran pencairan dana bantuan ASLUT;
- b. Melaksanakan bimbingan bila terjadi kasus lanjut usia, mendampingi penerima, keluarga untuk mengambil bantuan Program Aslut ke lembaga penyalur terdekat dengan membawa Surat Kuasa dari Penerima;
- c. Memantau dan membimbing pemanfaatan dana Aslut sesuai dengan tujuan program;



- d. Mengikuti pertemuan pendamping untuk tukar menukar informasi dan berbagai pengalaman dalam melaksanakan pendampingan;
- e. Membuat laporan hasil pendampingan pelaksanaan program Aslut secara periodic ke Dinas/Instansi Sosial Kabupaten;
- f. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota serta aparat Desa/Kelurahan setempat;
- g. Melaksanakan kunjungan rumah (*home visit*) secara berkala dan membuat laporan perkembangan kondisi fisik dan sosial penerima Aslut.

Tugas dan tanggungjawab Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) yaitu :

- a. Pendampingan sosial dalam rangka perlindungan sosial anak atau permasalahan anak;
- b. Pendampingan penguatan lembaga perlindungan anak;
- c. Penguatan masyarakat dalam perlindungan anak;
- d. Respon kasus atas permasalahan kasus anak.

Tugas dan tanggungjawab Taruna Siaga Bencana adalah sebagai berikut saat :

- a. Pra Bencana
  1. Pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana;
  2. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana;
  3. Pengurangan resiko bencana di lokasi rawan bencana;
  4. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana;
  5. Fasilitasi dalam pembentukan dan pengembangan Kampung Siaga Bencana;
  6. Pendeteksian dini kepada masyarakat atas kemungkinan terjadi bencana;



7. Evakuasi bersama pihak terkait terlebih dalam perlindungan sosial atas ancaman bahaya;
  8. Pengurangan resiko dan kesiapsiagaan lainnya.
- b. Tanggap Darurat
1. Kaji cepat dan melaporkan identifikasi serta rekomendasi kepada posko atau dinas/instansi sosial serta berkoordinasi dengan tim reaksi cepat bidang perlindungan dan jaminan sosial;
  2. Identifikasi/pendataan korban bencana;
  3. Operasi tanggap darurat pada bidang penyelamatan korban dari situasi tidak aman ke tempat yang lebih aman;
  4. Operasi tanggap darurat pada bidang penampungan sementara;
  5. Operasi tanggap darurat pada bidang dapur umum;
  6. Operasi tanggap darurat pada bidang logistic;
  7. Operasi tanggap darurat pada bidang psikososial;
  8. Mobilisasi dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko;
  9. Upaya tanggap darurat lainnya.
- c. Pasca Bencana
1. Identifikasi/pendataan kerugian material pada korban bencana;
  2. Identifikasi/pendataan kerusakan rumah atau tempat tinggal korban bencana;
  3. Penanganan bidang psikososial dan rujukan;
  4. Upaya penguatan dan pemulihan sosial korban bencana sosial berkoordinasi dengan pihak terkait;
  5. Pendampingan dalam advokasi sosial.



Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten terkait implementasi PKH dan sinkronisasi dengan program bantuan komplementer lainnya;
- b. Mengkoordinasikan, mengelola data dan melaporkan implementasi :
  1. Pertemuan awal dan validasi keluarga penerima manfaat (KPM);
  2. Verifikasi dan komitmen KPM untuk berpartisipasi di dalam PKH;
  3. Memutakhirkan data KPM dan fasilitasi dalam menyelesaikan kasus pengaduan masyarakat;
  4. Penyaluran bantuan sosial PKH;
  5. Mengelola dokumen dan data terkait PKH.
- c. Bersama dengan pekerja sosial supervisor mengkoordinasikan perencanaan dan pelaporan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2);
- d. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan dan permasalahan pelaksanaan PKH di seluruh kecamatan lokasi tugasnya;
- e. Mengkoordinasikan proses mediasi, fasilitasi, dan advokasi kepada keluarga penerima manfaat PKH di seluruh kecamatan lokasi tugasnya untuk memperoleh bantuan sosial PKH dan program komplementer lainnya.



Pendamping Program Keluarga Harapan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Memastikan bantuan sosial PKH diterima oleh keluarga penerima manfaat PKH tepat jumlah dan ttepat sasaran;
- b. Melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan kelaurga bersama keluarga penerima manfaat PKH paling sedikit 1 kali setiap bulan;
- c. Memfasilitasi keluarga penerima manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.

Tenaga Kerja Sosial Kecamatan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pemetaan sosial berupa data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan/atau dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. Melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial, dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota, dan kecamatan;
- c. Melakukan kerjasama dan/atau koordinasi dengan PSKS dan sumberdaya manusia kesejahteraan sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. Melakukan sinergi, integritas, dan sinkronisasi dengan camat dan/atau perangkat organisasi dibawahnya antara penyelenggara tugas umum pemerintahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan;



- e. Melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial baik atas inisiatif sendiri maupun atas penugasan dari berbagai pihak;
- f. Mengembangkan partisipasi sosial masyarakat dan jejaring kerja dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sedangkan karang taruna yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.2.6  
Daftar Karang Taruna Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Karang Taruna (KT)
(1)	(2)	(3)
1	Aek Bilah	3
2	Angkola Barat	6
3	Angkola Sangkunur	10
4	Angkola Selatan	5
5	Angkola Timur	10
6	Arse	8
7	Batang Angkola	6
8	Batang Toru	3
9	Marancar	12
10	Muara Batang Toru	5
11	Saipar Dolok Hole	7
12	Sayurmatinggi	19
13	Sipirok	36
14	Tantom Angkola	8
15	Kecamatan	14
16	Kabupaten	1
<b>Total</b>		<b>153</b>

Sumber : Bidang Pemberdayaan Sosial, 2018

Kegiatan Pendataan Cacat dan Penyakit Kejiwaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendata jumlah orang dengan kecacatan berat, lanjut usia terlantar dan yang memiliki penyakit kejiwaan di Kabupaten Tapanuli Selatan sedangkan pendataan cacat dan penyakit kejiwaan untuk tahun 2018 belum dilaksanakan. Adapun data penerima bantuan asistensi orang



dengan kecacatan (ASODK) berat, asistensi lanjut usia terlantar (Aslut) dan penyakit kejiwaan menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.7  
Daftar Penerima Bantuan ASODK Berat, Aslut  
dan Penyakit Kejiwaan Tahun 2017

No.	Kecamatan	Kecacatan Berat (Orang)	Penyakit Kejiwaan (Orang)	Lanjut Usia terlantar (Orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aek Bilah	3	5	-
2	Angkola Barat	13	-	35
3	Angkola Sangkunar	12	2	-
4	Angkola Selatan	7	-	-
5	Angkola Timur	5	-	39
6	Arse	5	3	-
7	Batang Angkola	11	2	46
8	Batang Toru	9	-	-
9	Marancar	10	-	-
10	Muara Batang Toru	8	-	-
11	Saipar Dolok Hole	8	8	-
12	Sayurminggi	13	4	-
13	Sipirok	7	4	-
14	Tantom Angkola	7	2	-
<b>Total</b>		<b>118</b>	<b>30</b>	<b>120</b>

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial, 2017

Penerima bantuan asistensi orang dengan kecacatan berat (ASODK Berat) tahun 2017 menerima bantuan uang sebanyak Rp. 300.000,- per bulan selama 10 bulan sedangkan tahun 2018 mendapat bantuan uang sebanyak Rp. 500.000,- untuk 3 bulan yang selanjutnya bantuan terhadap ASODK Berat dikategorikan ke dalam Program Keluarga Harapan. Penerima asistensi lanjut usia terlantar (Aslut) tahun 2017 mendapat bantuan uang sebanyak Rp. 200.000,- per bulan selama 10 bulan. Bantuan asistensi ASODK Berat maupun Aslut bersumber dana APBN Tahun 2017 dan 2018.



Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tapanuli Selatan menurun 0,20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan garis kemiskinan di Kabupaten Selatan meningkat menjadi 326.321 per kapita per bulan.

Tabel. 2.2.8  
Indikator Kemiskinan Kabupaten Tapanuli Selatan  
Tahun 2014-2016

Indikator	Satuan	Tahun		
		2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,74	11,37	11,15
Jumlah Penduduk Miskin	Ribuan Jiwa	29,38	31,20	30,84
Garis Kemiskinan (Rp./Kapita/Bulan)	Persen	293.441	300.449	326.321
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Persen	1,91	1,28	1,06
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Persen	0,46	0,22	0,19

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan, 2017

Adapun daftar Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Penerima Bantuan Iuran (PBI), Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dapat dilihat pada table berikut ini :



Tabel 2.2.9  
Daftar BDT Kesejahteraan Sosial, KKS, PKH dan Dapodik  
Tahun 2018\*

No.	KECAMATAN	BDT (Keluarga)	KKS (Keluarga)	PKH (Keluarga)	PBI (Keluarga)	Dapodik (Keluarga)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aek Bilah	686	525	185	282	686
2	Angkola Barat	2,042	1,590	1,165	1,417	2,042
3	Angkola Sangkunur	1,892	1,288	930	858	1,892
4	Angkola Selatan	3,129	2,146	1,288	1,593	3,129
5	Angkola Timur	2,539	1,229	800	1,176	2,539
6	Arse	879	558	312	495	879
7	Batang Angkola	3,689	1,938	1,270	1,700	3,689
8	Batang Toru	1,757	873	587	704	1,757
9	Marancar	1,037	650	412	482	1,037
10	Muara Batang Toru	1,133	759	548	540	1,133
11	Saipar Dolok Hole	1,631	1,146	727	987	1,631
12	Sayurminggi	2,579	1,602	1,047	1,363	2,579
13	Sipirok	2,850	1,694	873	1,423	2,850
14	Tantom Angkola	1,736	1,077	660	955	1,736
<b>Total</b>		<b>27,579</b>	<b>17,075</b>	<b>10,804</b>	<b>13,975</b>	<b>27,579</b>

Sumber : Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, 2018

\*Merupakan Hasil Pemutakhiran Data Terpadu Tahun 2015

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang selanjutnya disebut dengan bantuan beras sejahtera (Rastra) merupakan bantuan sosial dalam bentuk beras berkualitas medium kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sejumlah 10 kg setiap bulannya tanpa dikenakan harga/biaya tebus. Penerima manfaat bansos rastra adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut keluarga penerima manfaat (KPM) bansos rastra yang nama dan alamatnya termasuk di dalam daftar KPM dan ditetapkan oleh Menteri Sosial. Adapun mekanisme bansos rastra ini dimulai dari penugasan Kementerian Sosial kepada Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran bansos rastra sampai ke titik distribusi (TD). Setelah bansos rastra sampai di titik distribusi, pihak Perum Bulog



menyerahkan bansos rastra tersebut ke pihak kabupaten/kota. Pihak kabupaten selanjutnya menyalurkan bansos rastra dari titik distribusi ke titik bagi (TB) hingga sampai ke KPM dengan menyerahkan bansos rastra dalam jumlah 10 kg setiap bulannya.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Kriteria komponen kesehatan PKH meliputi ibu hamil/menyusui; dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. Kriteria komponen pendidikan PKH meliputi anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat; anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat; anak sekolah menengah atas/madrasah Aliyah atau sederajat; dan anak usia 6 (enam) sampai 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Sedangkan kriteria komponen kesejahteraan sosial PKH meliputi lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat. Dalam penerimaan bantuan sosial program keluarga harapan, keluarga penerima



manfaat mendapat bantuan pendampingan melalui pendamping PKH.

Sedangkan jumlah peserta badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) menurut kepesertaan dan bulan di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.10  
Jumlah Peserta BPJS di Kabupaten Tapanuli Selatan

Bulan	Jenis Kepesertaan		
	Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Non PBI	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari	132.872	54.816	187.688
Februari	134.363	55.315	189.678
Maret	134.503	55.869	190.372
April	134.318	57.510	191.828
Mei	133.926	57.781	191.707
Juni	133.627	58.932	192.559
Juli	133.661	58.065	191.726
Agustus	133.607	58.330	191.937
September	133.588	58.724	192.312
Oktober	141.442	59.349	200.791
November	141.389	53.507	194.896
Desember	141.334	53.914	195.248

Sumber : BPJS Kantor Cabang Padangsidimpuan, 2017

Berdasarkan tabel peserta BPJS di Kabupaten Tapanuli Selatan diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan peserta BPJS dari bulan januari hingga desember tahun 2017 melalui penerima bantuan iuran (PBI) per desember sebanyak 141.334 jiwa.

Evaluasi terhadap program dan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2017 telah mencapai target yang ditetapkan tetapi belum maksimal, hal ini disebabkan sangat minimnya Anggaran.



Adapun anggaran yang teralokasi tahun 2017 sebesar Rp. 5.960.954.679,- dengan rincian :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 2.310.954.679,-
- Belanja Langsung : Rp. 3.650.000.000,-

dengan realisasi fisik dan keuangan tahun 2017 sebesar 91,59% atau Rp. 5.459.871.244,-.

Sedangkan anggaran yang teralokasi tahun 2018 sebesar Rp. 5.547.780.013 dengan rincian :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 2.310.954.679,-
- Belanja Langsung : Rp. 3.650.000.000,-

Dengan realisasi fisik dan keuangan per Juni tahun 2018 sebesar Rp. 2.014.435.016,- atau 36,31%.



Tabel 2.2.11  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA SKPD					Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	TW II Tahun 2018	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12			13	14	16
<b>1</b>	<b>Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.64</b>	<b>92.97</b>	<b>93.29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.72</b>	<b>100</b>	<b>91.09</b>	<b>100</b>	<b>93.62</b>	
	Jumlah peserta sosialisasi, petugas dan pendamping yang mengikuti sosialisasi (orang)			0	0	0	120	100	0	0	0	120	100	100	110	
	Jumlah kepala keluarga yang terfasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin (kepala keluarga)			0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20	30	
	Jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi PMKS (orang)			0	0	0	24	10	0	0	0	24	0	10	10	
	Jumlah panti asuhan/ jompo yang mendapatkan bantuan sosial (panti)			0	0	0	8	8	0	0	0	8	8	8	8	
<b>2</b>	<b>Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial (%)</b>			0	0	0	35	37	0	0	0	35	0	37	39	
	Indeks Gini Rasio			0	0	0	<3	<3	0	0	0	<3	0	<3	<3	
	Terselenggaranya fasilitasi pemberian bantuan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak (orang)			0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	10	



	Terselenggaranya pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS serta fasilitasi konsultasi bagi keluarga pada LK3 (orang)			0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	50	
	jumlah keluarga penerima manfaat yang termonitoring pada PKH (orang)			0	0	0	60	60	0	0	0	60	20	60	60	
	Jumlah peserta pelatihan taruna siaga bencana (orang)			0	0	0	14	15	0	0	0	14	0	15	15	
<b>3</b>	<b>Persentase Penanganan para penyandang cacat dan trauma ( %)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum			0	0	0	0	0.31	0	0	0	0	0	0.31	0.32	
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh Petugas Terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu (P2TP2A) (%)			0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	100	
	Tersusunnya dokumen penyandang cacat dan penyakit kejiwaan (Dokumen)			0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	
	Jumlah peserta pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma (orang)			0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	15	15	
<b>4</b>	<b>Sarana sosial panti asuhan (unit)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
	<b>Sarana sosial panti jompo (unit)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
	Jumlah penghuni panti yang menjadi peserta pelatihan (orang)			0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30	30	
<b>5</b>	<b>Persentase penanganan eks penyandang penyakit sosial (%)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.26</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	



	Terselenggaranya sosialisasi dan pemutakhiran data-data sosial, pembangunan aplikasi sistem data terpadu kesejahteraan sosial, pembangunan website serta dokumen profil PMKS di Kab. Tapanuli Selatan (%)			0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	70	80	
6	Jumlah karang taruna yang telah dibina			0	0	0	3	3	0	0	0	3	0	3	3		
	Cakupan pelayanan administrasi sosial kemasyarakatan (%)			0	0	0	63.33	65	0	0	0	65.60	20	65	66.67		
	Persentase penyelesaian konflik (%)			0	0	0	100	80	0	0	0	100	0	80	83		
	Tersedianya dokumen kerjasama antara pelaku usaha dengan LK3, pusat bimbingan konseling, dan panti asuhan/jompo (Kerjasama)			0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6	6		
	Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM TKSK dan penanganan kasus di LK3 (orang)			0	0	0	30	0	0	0	0	21	0	0	70		
	Terlestarikannya nilai kepahlawanan, keperintisan masyarakat (Kali)			0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1		



### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

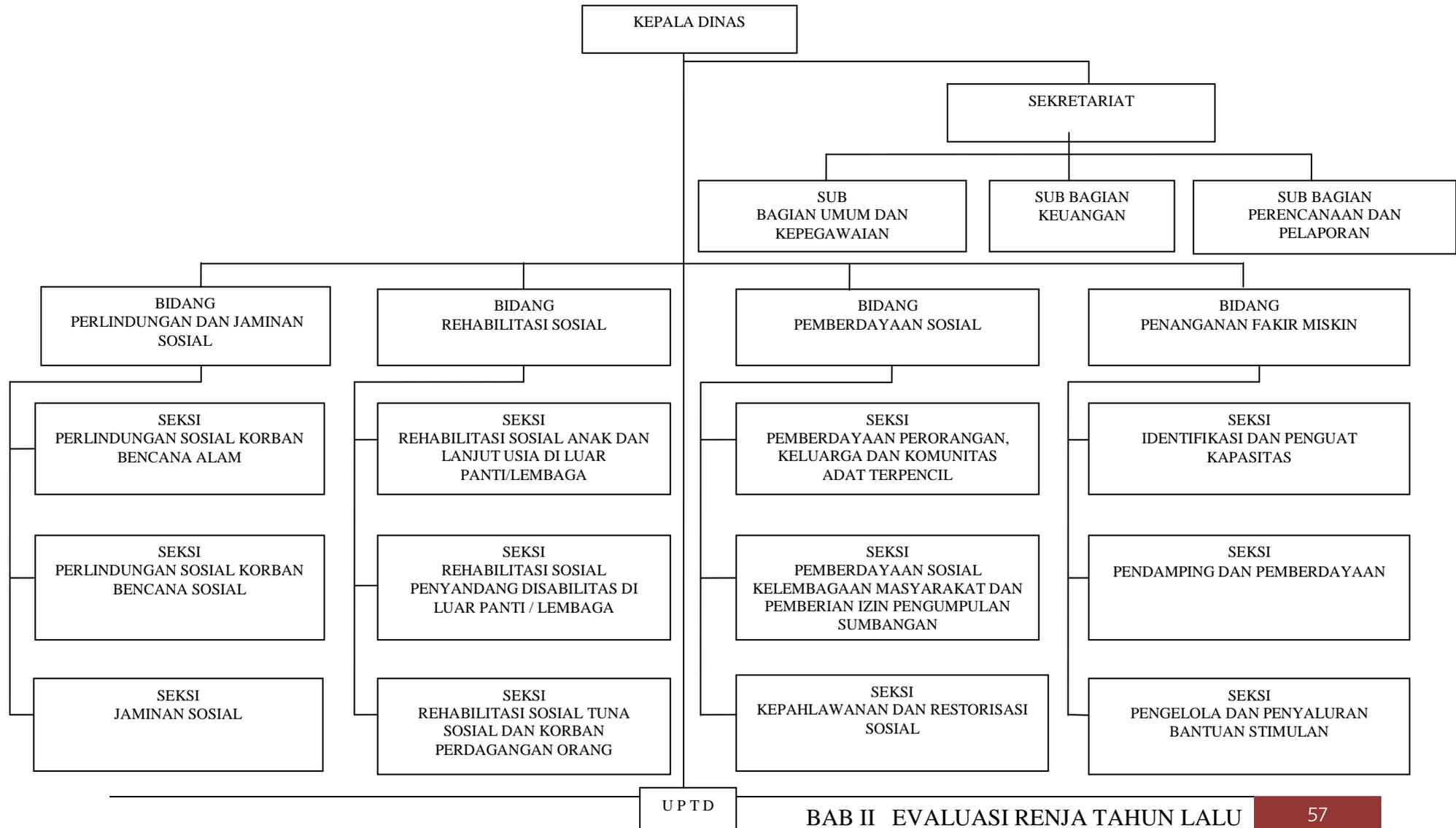
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Fungsi yang diemban adalah :

1. Perumusan Kebijakan Teknis bidang sosial, seperti Perlindungan dan Jaminan sosial, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



Bagan 1.  
Struktur Organisasi Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan





Sementara Uraian tugas pokok dan fungsi pejabat struktural satu tingkat dibawah Kepala Dinas (Eselon III/a dan III/b) adalah sebagai berikut :

**1. Sekretaris:**

- 1) Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas, memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Urusan Tata Usaha, Perlengkapan, Rumah Tangga, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha;
  - b. Koordinasi penyusunan perencanaan;
  - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
  - f. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
  - g. Koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang;
  - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
  - i. Koordinasi penyusunan laporan kinerja dan tanggung jawab pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dibidang sosial; dan
  - j. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.



## **2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

- 1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas, melaksanakan kebijakan teknis di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
  - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
  - d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **3. Bidang Rehabilitasi Sosial**

- 1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas, melaksanakan kebijakan teknis di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;



- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Pemberdayaan Sosial**

- 1) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas, melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial;
- 2) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
  - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
  - d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
  - e. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## **5. Bidang Penanganan Fakir Miskin**

- 1) Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang penanganan fakir miskin;
- 2) Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
  - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;
  - d. Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
  - e. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun daftar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :



Tabel 2.3.1

Daftar Pegawai dan THL (Tenaga Harian Lepas), Status serta  
Jabatan Tahun 2018

No.	Nama Pegawai	Status Pegawai	Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Drs. Nurdin Pane	PNS	Kepala Dinas Sosial Daerah
2.	Porang Pane, S. Pd	PNS	Sekretaris
3.	Nislah Khairani, S. Sos	PNS	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4.	Boniman	PNS	Kasubbag Keuangan
5.	Royhan Al Amin Siregar	PNS	Plt. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
6.	Sahwan Ritonga, S. Sos	PNS	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
7.	Pangundian, S. Sos	PNS	Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
8.	Hj. Samsiati, SP	PNS	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
9.	Jamaluddin Siregar, S. Sos	PNS	Kasi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil
10.	Yunita Siregar, SH	PNS	Kasi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan
11.	Ernawati Siregar, S. Sos	PNS	Kasi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
12.	Jufri Hotma Rambe, S. Sos	PNS	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
13.	Abdul Rahman Daulay, S. Ag	PNS	Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Luar Panti/Lembaga
14.	Zulkarnain Siregar, SP, M. Agr	PNS	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin



15.	Afrita Neldian, SE	PNS	Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
16.	Dra. Maulina Hanum	PNS	Kasi Pendampingan dan Pemberdayaan
17.	Nelli Molida Harahap, S. Kep, Ns	PNS	Kasi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan
18.	Drs. Sabar Makmur	PNS	Staf Subbag Umum
19.	Marhamah, S. Sos	PNS	Staf Subbag Umum
20.	Purnama Nasution, S. Sos	PNS	Staf Subbag Umum
21.	Mhd Jefri Siregar	PNS	Staf Subbag Umum
22.	Khairuddin Siregar	PNS	Staf Subbag Umum
23.	Yevi Masripa	PNS	Staf Subbag Keuangan
24.	Fitrianti Harahap	PNS	Staf Perlindungan dan Jaminan Sosial
25.	Azhari, SH	PNS	Staf Pemberdayaan Sosial
26.	Muhammad Yusuf	PNS	Staf Pemberdayaan Sosial
27.	Hj. Siti Elmi Harahap, S. Sos	PNS	Staf Rehabilitasi Sosial
28.	Khairun Nisa	PNS	Staf Rehabilitasi Sosial
29.	Parimpunan, SE	PNS	Staf Penanganan Fakir Miskin
30.	Sri Sartika Pospos	THL	Staf Subbag Umum
31.	Elisa Fatmawati, S.Tr.Keb	THL	Staf Subbag Umum
32.	Ali Sahbana Harahap	THL	Staf Subbag Umum
33.	Eni Herawani, S. Pd	THL	Staf perlindungan dan Jaminan Sosial
34.	Shusi Novita Siregar, S. Pi	THL	Staf Pemberdayaan Sosial
35.	Uswatun Hasanah, S. Pt	THL	Staf Rehabilitasi Sosial

Sumber : Dinas Sosial Daerah, 2018

Sedangkan daftar inventaris Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2018 dalam mendukung kinerja ASN adalah sebagai berikut :



Tabel 2.3.2  
Daftar Barang Inventaris Dinas Sosial Daerah  
Tahun 2018

No.	Nama Barang	Jumlah	Tahun Pembelian
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mobil Daihatsu Terios	1 Unit	2007
2.	Mobil Kijang Innova	1 Unit	2015
3.	Sepeda Motor Honda Supra GTR	2 Unit	2017
4.	Sepeda Motor Honda CB150R	1 Unit	2017
5.	Lemari Merek Montana	1 Unit	2017
6.	Filling Besi Merek Yunika	2 Unit	2011
7.	Filling Besi Merek Awiko	4 Unit	2017
8.	Filling Besi Merek Montana	4 Unit	2017
9.	Brankas	1 Unit	2017
10.	Lemari Kaca	1 Unit	2005
11.	Lemari Kayu	1 unit	2013
12.	Kursi Putar Merek Phoenix	3 Unit	2016
13.	Kursi Lipat Merek Chitose	20 Unit	2017
14.	Meja Biro Merek Sands	2 Unit	2016
15.	Lemari Es Merek LG 1 Pintu	2 Unit	2017
16.	Lemari Es Merek Sharp	1 Unit	2012
17.	Dispenser	1 Unit	2012
18.	Televisi LED 28" Merek LG	2 Unit	2017
19.	Sound System DAT/MP 8900 Rocky	1 Unit	2017
20.	Personal Computer (PC) Merek BenQ	1 Unit	2012
21.	Personal Computer (PC) Merek Asus	1 Unit	2015
22.	Laptop Merek Acer	1 Unit	2013
23.	Note Book Merek Asus 14"	1 Unit	2015
24.	Note Book Merek ASUS FX553VD	12 Unit	2017
25.	Printer Merek Epson L385	7 Unit	2017
26.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 Unit	2013



27.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural Merek Sands	3 Unit	2016
28.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6 Unit	2017
29.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-Lain Merek Chitose	20 Unit	2012
30.	Proyektor Merek Optoma	1 Unit	2017
31.	Kamera Merek Canon EOS 80D	1 Unit	2017
32.	Pesawat Telepon Merek Panasonic	1 Unit	2007
<b>Total</b>		<b>107 Unit</b>	

Sumber : Dinas Sosial Daerah, 2018

Data pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dan struktural adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.3  
Daftar Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  
Fungsional dan Struktural Tahun 2018

No.	Nama	Pelatihan Fungsional	Pelatihan Struktural
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Drs. Nurdin Pane	-	Diklat PIM Tk. III
2.	Porang Pane, S. Pd	Diklat Proses Pembukuan, Verifikasi dan Penatausahaan LPJ Bendahara di Lingkungan OPD Kabupaten/Kota dan Provinsi	Diklat PIM Tk. III
3.	Pangundian, S. Sos	-	ADUM/PIM Tk. IV
4.	Zulkarnain Siregar, SP, M.Agr	-	Diklat PIM Tk. III
5.	Hj. Samsiati, SP	-	Diklat PIM Tk. IV
6.	Jufri Hotma Rambe, S. Sos	-	Diklat PIM Tk. IV



6.	Royhan Al Amin Siregar	Diklat Dasar PMHP Ahli Diklat PPNS PMHP Kementan RI Diklat LKj Diklat Renstra dan Renja	-
7.	Nislah Khairani, S. Sos	Diklat SKP	ADUM/ PIM Tk.IV
8.	Boniman	Diklat Proses Pembukuan, Verifikasi dan Penatausahaan LPJ Bendahara di Lingkungan OPD Kabupaten/Kota dan Provinsi	-
9.	Mhd Jefri Siregar	Diklat Penghapusan Barang Aset Inventaris	-

Sumber : Dinas Sosial Daerah, 2018

Sedangkan dalam melaksanakan program pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tapanuli Selatan masih dihadapi hambatan-hambatan yang memerlukan penanganan dan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan program.

Ada beberapa faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan juga akan menjadi penghalang bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Daerah yaitu belum mencukupinya jumlah pegawai dan masih terbatasnya keahlian teknis administrasi pegawai yang ada.

Dampak dari terbatasnya jumlah pegawai dan terbatasnya keahlian menyebabkan belum optimalnya mutu administrasi. Untuk mendukung kondisi yang diinginkan maka perlu peningkatan kemampuan teknis, sarana prasarana kerja dipenuhi



sesuai standard dan kuantitas pegawai juga perlu ditambah jumlahnya.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial, antara lain :

1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) jumlahnya meningkat setiap tahun sehingga sasaran selalu lebih banyak dari capaian, dimana rata-rata laju pertumbuhan PMKS yang mendapat bantuan sosial hingga Juni 2018 sebesar 12,69%, dan yang menambah permasalahan adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
2. Sarana dan prasarana serta SDM masih belum mencukupi baik jumlah maupun kapabilitas pegawai, sehingga diperlukan sarana dan prasarana peningkatan kualitas SDM seperti UPTD bidang kesejahteraan sosial pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dinas dan pendamping kesejahteraan sosial, serta masih kurangnya pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
3. Sinkronisasi penganggaran antara Pemerintah Provinsi dan Pusat dengan Kabupaten untuk pembangunan bidang kesejahteraan sosial belum optimal, hal ini disebabkan data base PMKS belum tersedia yang digunakan sebagai dasar dalam perumusan program kegiatan yang telah sinkron dengan provinsi dan pusat;
4. Masih belum optimalnya koordinasi/kerjasama dengan SKPD serumpun dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Dari permasalahan sosial yang perlu mendapat perhatian dan keterkaitan dengan urusan serta kewenangan Dinas Sosial Daerah maka isu strategis saat ini yang cukup menonjol dalam pembangunan kesejahteraan sosial terutama untuk mencapai



kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan. Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan bidang sosial Tahun 2016-2021, yang menjadi prioritas penanganan adalah :

1. Belum optimalnya cakupan layanan kesejahteraan sosial dan kinerja pelayanan kesejahteraan sosial pada pusat-pusat pelayanan;
2. Masih cukup tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dimana jumlah PMKS yang mendapat bantuan sosial per Juni Tahun 2018 sebesar 69.027 orang atau 98,28% dari 70.234 orang yang seharusnya menerima bantuan sosial. Sedangkan jumlah penduduk kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 9,91% dengan persentase penduduk di atas garis kemiskinan sebesar 90,09%. Hal ini menunjukkan bahwa rasio persentase penduduk di atas garis kemiskinan meningkat sebesar 0,13% dan persentase jumlah penduduk miskin menurun sebesar 0,13%;
3. Kurangnya pemahaman tentang peranan dan partisipasi perempuan serta kurangnya kepedulian terhadap perlindungan anak dalam pembangunan, terdapatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, tingginya pengaruh negatif media terhadap pembentukan kepribadian anak, dan lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak.



## **2.4 Review Terhadap RKPD Perubahan 2018**

RKPD Perubahan Tahun 2018 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja perubahan Dinas Sosial Daerah Tahun 2018, dimana dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Sosial Daerah.

Adapun review Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD Perubahan) 2018 terhadap Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Daerah adalah sebagai berikut :



Tabel 2.4.1  
Review Terhadap Rencana Strategis OPD Tahun 2018  
Kabupaten Tapanuli Selatan

No.	Rencana Kerja Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>URUSAN WAJIB</b>									
	<b>BIDANG SOSIAL</b>									
	<b>DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN</b>				<b>2,588,125,000</b>					<b>4,149,062,720</b>
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)</b>	<b>100%</b>	<b>756,744,585</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)</b>	<b>100%</b>	<b>873,024,952</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Tapanuli Selatan	Terpenuhinya jasa surat - menyurat SKPD (Benda Pos)	150 Benda Pos	1,025,000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Tapanuli Selatan	Terpenuhinya jasa surat - menyurat SKPD (Benda Pos)	165 Benda Pos	990,000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Tapanuli Selatan	Pembayaran rekening listrik, telepon dan wifi (Bulan)	12 Bulan	41,000,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Tapanuli Selatan	Pembayaran rekening listrik, telepon dan wifi (Bulan)	12 Bulan	35,000,000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Kab. Tapanuli Selatan	Pembayaran pajak kendaraan dinas/ operasional, roda 4 : 3 unit dan roda 2 : 1 unit (Bulan)	12 Bulan	7,175,000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Kab. Tapanuli Selatan	Pembayaran pajak kendaraan dinas/ operasional, roda 4 : 3 unit dan roda 2 : 1 unit (Bulan)	12 Bulan	7,000,000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kab. Tapanuli Selatan	Peralatan kantor dalam kondisi baik (Bulan)	-	-	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kab. Tapanuli Selatan	Peralatan kantor dalam kondisi baik (Bulan)	-	-
	Penyediaan alat tulis kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya alat tulis kantor (Bulan)	12 Bulan	48,175,000	Penyediaan alat tulis kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya alat tulis kantor (Bulan)	12 Bulan	40,075,000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor (Bulan)	12 Bulan	42,108,041	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor (Bulan)	12 Bulan	28,627,000



	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya komponen alat-alat listrik (Bulan)	12 Bulan	15,375,000	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya komponen alat-alat listrik (Bulan)	12 Bulan	7,583,000
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor (Bulan)	12 Bulan	15,375,000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor (Bulan)	12 Bulan	13,080,000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya surat kabar kantor/majalah dinas (Bulan)	12 Bulan	20,500,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya surat kabar kantor/majalah dinas (Bulan)	12 Bulan	20,000,000
	Penyediaan makanan dan minuman	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat kantor (Kotak)	1163 Kotak	20,494,875	Penyediaan makanan dan minuman	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat kantor (Kotak)	465 Kotak	12,900,000
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Tapanuli Selatan	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (OH)	200 OH	204,897,295	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Tapanuli Selatan	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (OH)	233 OH	317,102,500
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kab. Tapanuli Selatan	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (OH)	200 OH	94,710,000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kab. Tapanuli Selatan	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (OH)	360 OH	94,650,000
	Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Tapanuli Selatan	Terpenuhinya pelayanan jasa THL 6 orang, pejabat pengadaan barang jasa 1 orang, tim penerima hasil pekerjaan 3 orang, bendahara pengeluaran 1 orang, bendahara pembantu juru bayar 1 orang, bendahara pembantu pembukuan 1 orang, pembantu pengurus barang pengguna 1 orang (%)	100%	245,909,374	Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Tapanuli Selatan	Terpenuhinya pelayanan jasa THL 8 orang, pejabat pengadaan barang jasa 1 orang, tim penerima hasil pekerjaan 3 orang, bendahara pengeluaran 1 orang, bendahara pembantu juru bayar 1 orang, bendahara pembantu pembukuan 1 orang, pembantu pengurus barang pengguna 1 orang (%)	100%	296,017,452
<b>2.</b>	<b>Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Kemasyarakatan</b>		<b>Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)</b>	<b>33%</b>	<b>-</b>	<b>Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Kemasyarakatan</b>		<b>Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)</b>	<b>33%</b>	<b>-</b>
	Peringatan HUT Tapanuli Selatan	Kab. Tapanuli Selatan	Terselenggaranya pameran pembangunan OPD Dinas dalam rangka HUT Tapanuli Selatan (kali)	1 Kali	-	Peringatan HUT Tapanuli Selatan	Kab. Tapanuli Selatan	Terselenggaranya pameran pembangunan OPD Dinas dalam rangka HUT Tapanuli Selatan (kali)	1 Kali	-



3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)	100%	262,817,175	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)	100%	1,161,468,648
	Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional (Unit)	4 Unit	-	Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional (Unit)	2 Unit	720,000,000
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (unit)	4 unit	61,500,000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (unit)	12 Unit	164,500,000
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya peralatan gedung kantor (unit)	10 unit	71,750,000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya peralatan gedung kantor (unit)	9 Unit	72,527,544
	Pengadaan Meubelair	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya meubelair kantor (unit)	10 unit	-	Pengadaan Meubelair	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya meubelair kantor (unit)	10 Unit	84,562,648
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Brankas 1 Unit, Lemari kabinet 1 unit, Filling kabinet 8 unit, laptop 12 unit, printer 7 unit, kursi kerja 26 unit, kamera EOS 1 unit, proyektor 1 unit, sound system 1 unit, TV LED 2 unit, kulkas 2 unit (unit)	-	-	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Brankas 1 Unit, Lemari kabinet 1 unit, Filling kabinet 8 unit, laptop 12 unit, printer 7 unit, kursi kerja 26 unit, kamera EOS 1 unit, proyektor 1 unit, sound system 1 unit, TV LED 2 unit, kulkas 2 unit (unit)	-	-
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Terpeliharanya gedung kantor (Bulan)	12 Bulan	15,375,000	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Terpeliharanya gedung kantor (Bulan)	12 Bulan	-
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Kab. Tapanuli Selatan	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional (Bulan)	12 Bulan	98,817,175	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Kab. Tapanuli Selatan	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional (Bulan)	12 Bulan	114,378,456
	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Terpeliharanya perlengkapan kantor (Bulan)	12 Bulan	-	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Terpeliharanya perlengkapan kantor (Bulan)	-	-
	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Terpeliharanya peralatan kantor (Bulan)	12 Bulan	15,375,000	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Kab. Tapanuli Selatan	Terpeliharanya peralatan kantor (Bulan)	12 Bulan	5,500,000
	Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional	Kab. Tapanuli Selatan	Telah diperbaikinya kendaraan dinas/ operasional (Unit)	-	-	Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional	Kab. Tapanuli Selatan	Telah diperbaikinya kendaraan dinas/ operasional (Unit)	-	-



<b>4.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)</b>	<b>100%</b>	<b>51,250,000</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah pakaian dinas harian dan tenun daerah (Stel)	39 stel PDH; 39 stel tenun daerah	-	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah pakaian dinas harian dan tenun daerah (Stel)	-	-
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah pakaian olah raga dan pakaian lapangan (Stel)	80 Stel	51,250,000	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah pakaian olah raga dan pakaian lapangan (Stel)	80 Stel	-
<b>5.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Fungsional (Orang)</b>	<b>20 orang</b>	<b>71,750,000</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Fungsional (Orang)</b>	<b>20 orang</b>	<b>14,000,000</b>
	Pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	20 orang	71,750,000	Pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	2 Orang	14,000,000
<b>6.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)</b>	<b>100%</b>	<b>102,500,000</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)</b>	<b>100%</b>	<b>77,225,800</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi kinerja SKPD	Kab. Tapanuli Selatan	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD, lakip, laporan keuangan akhir tahun, renja, perubahan renja, RKA, Perubahan RKA, revisi renstra 2016-2021, ranwal renstra 2022-2026 (Dokumen)	6 Dokumen = Lakip, Renja, Perubahan Renja, RKA, Perubahan RKA, Revisi Renstra 2016-2021	98,000,000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi kinerja SKPD	Kab. Tapanuli Selatan	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD, lakip, laporan keuangan akhir tahun, renja, perubahan renja, RKA, Perubahan RKA, revisi renstra 2016-2021, ranwal renstra 2022-2026 (Dokumen)	6 Dokumen = Lakip, Renja, Perubahan Renja, RKA, Perubahan RKA, Revisi Renstra 2016-2021	54,918,800
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kab. Tapanuli Selatan	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun serta laporan penerimaan dan pengeluaran Dinas (Dokumen)	2 Dokumen = Laporan Keuangan akhir tahun serta laporan penerimaan dan pengeluaran Dinas	4,500,000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kab. Tapanuli Selatan	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun serta laporan penerimaan dan pengeluaran Dinas (Dokumen)	2 Dokumen = Laporan Keuangan akhir tahun serta laporan penerimaan dan pengeluaran Dinas	22,307,000



7	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>		<b>Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)</b>	<b>93.29%</b>	<b>348,948,240</b>	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>		<b>Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)</b>	<b>93.29%</b>	<b>369,705,600</b>
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta sosialisasi, petugas dan pendamping yang mengikuti sosialisasi (orang)	100 orang = 50 Orang ; 50 orang	124,775,000	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta sosialisasi, petugas dan pendamping yang mengikuti sosialisasi (orang)	100 orang = 50 Orang ; 50 orang	151,000,000
	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta keluarga miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan (orang)	1 Pelatihan; 10 Orang	-	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta keluarga miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan (orang)	-	-
	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah kepala keluarga yang terfasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin (kepala keluarga)	30 Kepala Keluarga	30,750,000	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah kepala keluarga yang terfasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin (kepala keluarga)	20 Kepala Keluarga	30,000,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah kepala keluarga yang menerima sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin (kepala keluarga)	30 Kepala Keluarga	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah kepala keluarga yang menerima sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin (kepala keluarga)	-	-
	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi PMKS (orang)	1 Pelatihan; 10 Orang	71,750,000	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi PMKS (orang)	1 Pelatihan; 10 Orang	70,000,000
	Pembinaan dan Peningkatan Kinerja tim PMKS dan Pemberian bantuan ke panti Sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah panti asuhan/ jompo yang mendapatkan bantuan sosial (panti)	8 panti	121,673,240	Pembinaan dan Peningkatan Kinerja tim PMKS dan Pemberian bantuan ke panti Sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah panti asuhan/ jompo yang mendapatkan bantuan sosial (panti)	8 panti	118,705,600
8.	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>		<b>Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial (%)</b>	<b>37%</b>	<b>475,875,000</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>		<b>Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial (%)</b>	<b>37%</b>	<b>1,144,206,720</b>
	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	Kab. Tapanuli Selatan	Terselenggaranya fasilitasi pemberian bantuan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak (orang)	10 Orang	20,500,000	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	Kab. Tapanuli Selatan	Terselenggaranya fasilitasi pemberian bantuan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak (orang)	10 Orang	19,975,000



	Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Terselenggaranya pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS serta fasilitasi konsultasi bagi keluarga pada LK3 (orang)	20 Orang; 50 Orang	51,250,000	Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Terselenggaranya pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS serta fasilitasi konsultasi bagi keluarga pada LK3 (orang)	20 Orang; 50 Orang	46,169,000
	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal (orang)	1 Pelatihan; 10 Orang	-	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal (orang)	-	-
	Pembentukan Pusat Informasi Penyandang Cacat dan Trauma Center	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya pusat informasi penyandang cacat dan trauma center (unit)	-	-	Pembentukan Pusat Informasi Penyandang Cacat dan Trauma Center	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya pusat informasi penyandang cacat dan trauma center (unit)	-	-
	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Kab. Tapanuli Selatan	jumlah orang yang memperoleh bantuan bagi PMKS (orang)	50 Orang	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Kab. Tapanuli Selatan	jumlah orang yang memperoleh bantuan bagi PMKS (orang)	-	-
	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Kab. Tapanuli Selatan	Meningkatnya perencanaan, pemutakhiran data, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi, serta penanganan pengaduan bantuan sosial rastra (%)	70%	30,000,000	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Kab. Tapanuli Selatan	Meningkatnya perencanaan, pemutakhiran data, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi, serta penanganan pengaduan bantuan sosial rastra (%)	70%	619,462,720
	Pembinaan/ monitoring Program Keluarga Harapan	Kab. Tapanuli Selatan	jumlah keluarga penerima manfaat yang termonitoring pada PKH (orang)	60 orang, 1 Dokumen	276,750,000	Pembinaan/ monitoring Program Keluarga Harapan	Kab. Tapanuli Selatan	jumlah keluarga penerima manfaat yang termonitoring pada PKH (orang)	60 orang, 1 Dokumen	363,600,000
	Pelatihan Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan taruna siaga bencana (orang)	15 Orang	97,375,000	Pelatihan Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan taruna siaga bencana (orang)	15 Orang	95,000,000
<b>9.</b>	<b>Program Pembinaan Anak Terlantar</b>		<b>Persentase penanganan anak terlantar (%)</b>	<b>24%</b>	<b>-</b>	<b>Program Pembinaan Anak Terlantar</b>		<b>Persentase penanganan anak terlantar (%)</b>	<b>24%</b>	<b>-</b>
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Penampungan Anak Terlantar	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar (Unit)	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Penampungan Anak Terlantar	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar (Unit)	-	-



	Penyusunan Data dan Analisis Permasalahan Anak Terlantar	Kab. Tapanuli Selatan	Tersusunnya dokumen analisis permasalahan anak terlantar (dokumen)	1 Dokumen	-	Penyusunan Data dan Analisis Permasalahan Anak Terlantar	Kab. Tapanuli Selatan	Tersusunnya dokumen analisis permasalahan anak terlantar (dokumen)	-	-
	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah tenaga pembinaan anak terlantar pada pelatihan keterampilan (orang)	10 Orang	-	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah tenaga pembinaan anak terlantar pada pelatihan keterampilan (orang)	-	-
<b>10.</b>	<b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</b>		<b>Persentase Penanganan para penyandang cacat dan trauma ( % )</b>	<b>24%</b>	<b>236,365,000</b>	<b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</b>		<b>Persentase Penanganan para penyandang cacat dan trauma ( % )</b>	<b>24%</b>	<b>230,600,000</b>
	Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan	Kab. Tapanuli Selatan	Tersusunnya dokumen penyandang cacat dan penyakit kejiwaan (Dokumen)	1 Dokumen	133,865,000	Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan	Kab. Tapanuli Selatan	Tersusunnya dokumen penyandang cacat dan penyakit kejiwaan (Dokumen)	1 Dokumen	130,600,000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perawatan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma (unit)	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perawatan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma (unit)	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma (orang)	15 Orang	102,500,000	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma (orang)	15 Orang	100,000,000
	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta penyandang cacat dan eks trauma yang diberdayakan (orang)	15 Orang	-	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta penyandang cacat dan eks trauma yang diberdayakan (orang)	-	-
	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatihan dan Pendidik	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan keterampilan bagi tenaga pelatihan dan pendidik (orang)	10 Orang	-	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatihan dan Pendidik	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan keterampilan bagi tenaga pelatihan dan pendidik (orang)	-	-
<b>11.</b>	<b>Program pembinaan panti asuhan/ jompo</b>				<b>71,750,000</b>	<b>Program pembinaan panti asuhan/ jompo</b>				<b>40,020,000</b>
			<b>Sarana sosial panti asuhan (unit)</b>	<b>4 unit</b>				<b>Sarana sosial panti asuhan (unit)</b>	<b>4 unit</b>	-
			<b>Sarana sosial panti jompo (unit)</b>	<b>4 unit</b>				<b>Sarana sosial panti jompo (unit)</b>	<b>4 unit</b>	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana panti asuhan/jompo (unit)	-	-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana panti asuhan/jompo (unit)	-	-
	Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo	Kab. Tapanuli Selatan	Meningkatnya penyelenggaraan panti asuhan/jompo (%)	-	-	Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo	Kab. Tapanuli Selatan	Meningkatnya penyelenggaraan panti asuhan/jompo (%)	-	-
	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah penghuni panti yang menjadi peserta pelatihan (orang)	30 Orang	71,750,000	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah penghuni panti yang menjadi peserta pelatihan (orang)	30 Orang	40,020,000



	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatihan dan Pendidik	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik bagi penghuni panti asuhan/jompo (orang)	10 Orang	-	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatihan dan Pendidik	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik bagi penghuni panti asuhan/jompo (orang)	-	-
<b>12.</b>	<b>Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)</b>		<b>Persentase penanganan eks penyandang penyakit sosial (%)</b>	<b>24%</b>	<b>158,875,000</b>	<b>Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)</b>		<b>Persentase penanganan eks penyandang penyakit sosial (%)</b>	<b>24%</b>	<b>155,000,000</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial (orang)	15 Orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial (orang)	-	-
	Pembangunan Pusat Bimbingan/ Konseling Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial (unit)	1 Unit	-	Pembangunan Pusat Bimbingan/ Konseling Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial (unit)	-	-
	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang diberdayakan (orang)	10 Orang	-	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang diberdayakan (orang)	-	-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Tapanuli Selatan	Terselenggaranya sosialisasi dan pemutakhiran data-data sosial, pembangunan aplikasi sistem data terpadu kesejahteraan sosial, pembangunan website serta dokumen profil PMKS di Kab. Tapanuli Selatan (%)	70% = 20 orang, 1 Dokumen, 1 Aplikasi, 1 website, 1 Dokumen	158,875,000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Tapanuli Selatan	Terselenggaranya sosialisasi dan pemutakhiran data-data sosial, pembangunan aplikasi sistem data terpadu kesejahteraan sosial, pembangunan website serta dokumen profil PMKS di Kab. Tapanuli Selatan (%)	70% = 20 orang, 1 Dokumen, 1 Aplikasi, 1 website, 1 Dokumen	155,000,000
<b>13.</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>		<b>Jumlah karang taruna yang telah dibina</b>	<b>3 karang taruna</b>	<b>51,250,000</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>		<b>Jumlah karang taruna yang telah dibina</b>	<b>3 karang taruna</b>	<b>83,811,000</b>
	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya dokumen kerjasama antara pelaku usaha dengan LK3, pusat bimbingan konseling, dan panti asuhan/jompo (Kerjasama)	6 Kerjasama = 3 Lk3, 1 pusat bimbingan konseling dan 2 panti asuhan/jompo	20,500,000	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kab. Tapanuli Selatan	Tersedianya dokumen kerjasama antara pelaku usaha dengan LK3, pusat bimbingan konseling, dan panti asuhan/jompo (Kerjasama)	6 Kerjasama = 3 Lk3, 1 pusat bimbingan konseling dan 2 panti asuhan/jompo	20,000,000



	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM kesejahteraan sosial dan organisasi masyarakat yang mendapat bantuan fasilitasi usaha (orang)	50 orang; 3 organisasi	-	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM kesejahteraan sosial dan organisasi masyarakat yang mendapat bantuan fasilitasi usaha (orang)	-	-
	Penanganan konflik sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM TKSK dan penanganan kasus di LK3 (orang)	Pelatihan peningkatan SDM TKSK 30 orang dan Penanganan 15 kasus di LK3	-	Penanganan konflik sosial	Kab. Tapanuli Selatan	Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM TKSK dan penanganan kasus di LK3 (orang)	-	-
	Pelestarian nilai - nilai kesetiakawanan	Kab. Tapanuli Selatan	Terlestarikannya nilai kepahlawanan, keperintisan masyarakat (Kali)	Terselenggaranya hari kesetiakawanan sosial 20 Desember (1 Kali)	30,750,000	Pelestarian nilai - nilai kesetiakawanan	Kab. Tapanuli Selatan	Terlestarikannya nilai kepahlawanan, keperintisan masyarakat (Kali)	Terselenggaranya hari kesetiakawanan sosial 20 Desember (1 Kali)	63,811,000
<b>TOTAL</b>					<b>2,588,125,000</b>					<b>4,149,062,720</b>



## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) masyarakat. Adapun aspirasi masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial berupa pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan usaha produktif PMKS.

Di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dituntut untuk siap dan sanggup membuat/ menyusun suatu program yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara umum, khususnya Dinas Sosial Daerah.

Proses penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial Daerah Tahun 2018 didasarkan kepada Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD Perubahan) Tahun 2018, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Daerah didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten, perubahan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Daerah dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada forum OPD Kabupaten tidak banyak usulan yang disampaikan pada saat pembahasan hanya bersifat masukan berupa harapan terhadap rencana pelaksanaan program kegiatan.



### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam pembangunan kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial RI dalam 5 tahun (2015-2019) akan melaksanakan 3 (tiga) dari 7 (tujuh) misi pemerintah, yaitu misi keempat : Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; misi kelima : Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; misi ketujuh : Mewujudkan penduduk yang berkepribadian dalam kebudayaan. Sedangkan dalam agenda prioritas nasional yang dikenal dengan Nawacita, Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Nawacita, yaitu Nawacita ketiga : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan; Nawacita kelima : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; Nawacita kedelapan : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan Nawacita kesembilan : Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Sehingga peran dan fungsi Kementerian Sosial akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan daya saing penduduk terutama kelompok miskin dan rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia, komunitas adat terpencil (KAT) serta kelompok marjinal lainnya yang dilandasi semangat kegotong-royongan dan kesetiakawanan sosial yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009, merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial,



dan perlindungan sosial. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sedangkan menurut RPJMN 2015-2019, perlindungan sosial yang komprehensif merupakan amanat yang diemban Kementerian Sosial RI dan merupakan perpaduan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar sektoral untuk meringankan dampak kemiskinan dan kemelaratan. Secara umum permasalahan sosial dapat dikelompokkan menjadi :

1. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi penduduk miskin dan rentan serta kelompok marjinal lainnya;
2. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan perlindungan sosial yang belum komprehensif, termasuk membedakan antara asistensi regular dan asistensi temporer bagi penduduk miskin dan rentan;
3. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan ketimpangan akses penjangkauan pelayanan dasar.

Adapun Faktor-faktor Penghambat Pelayanan Dinas Sosial Daerah yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari kebijakan nasional adalah sebagai berikut :



- a. Masih kurang kesadaran bagi masyarakat tentang pengertian PMKS;
- b. Belum lengkapnya data–data PMKS di Kabupaten Tapanuli Selatan;
- c. Masih minimnya fasilitas di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- d. Keterbatasan dana APBD Kabupaten Tapanuli Selatan sehingga dana untuk sebagian besar kegiatan Dinas belum tertampung;
- e. Keterbatasan dana yang tertampung untuk kegiatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- f. Kurangnya perhatian masyarakat;
- g. Belum tertampungnya dana untuk identifikasi, sosialisasi ke daerah;
- h. Masih kurangnya motivasi masyarakat untuk kerja mandiri.

Sedangkan faktor–faktor pendorong pelayanan Dinas Sosial Daerah yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari Kebijakan Nasional :

- a. Adanya sarana untuk tempat pendidikan dan pelatihan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- b. Besarnya animo masyarakat di pedesaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- c. Adanya sarana dan prasarana serta fasilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
- d. Penyediaan dana untuk kegiatan PMKS dan penyediaan sarana dan prasarana.



### 3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Utara, ada 3 (tiga) misi yang terkait erat dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tapanuli Selatan, antara lain :

- a. Misi Pertama yaitu Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Mandiri Dan Sejahtera dan Berwawasan Lingkungan, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan sejahtera maka arah kebijakan pembangunan kedepannya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat serta meningkatkan kepekaan sosial melalui pengembangan berbagai program yang lebih menyentuh kepada kebutuhan masyarakat terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, yang berlandaskan pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*);
- b. Misi Ketiga yaitu Mewujudkan Sumatera Utara yang Berbudaya, Religius Dalam Keberagaman, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi Sumatera Utara yang berbudaya, religius dalam keberagaman maka arah kebijakan pembangunan kedepannya difokuskan kepada kebijakankebijakan yang mampu menciptakan suasana kehidupan intern dan antar umat yang saling menghormati dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan damai serta menyelesaikan dan mencegah konflik antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat agar dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya;



- c. Misi Keempat yaitu Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Partisipatif Dan Peduli Terhadap Proses Pembangunan, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi pemberdayaan masyarakat demi menciptakan masyarakat yang mandiri arah kebijakan pembangunan kedepannya diarahkan kepada : penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling); memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering) serta melindungi kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah; peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana sosial ekonomi sebagai penunjang pembangunan; menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni dalam keberagamaan; mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang partisipatif dan peduli terhadap proses pembangunan.

Adapun strategi Pemerintah Provinsi Sumatera dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (*strategy basic need*) dilaksanakan melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui urusan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, pengembangan sistem perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas. Peningkatan derajat kesejahteraan sosial masyarakat yang diarahkan pada kebijakan kualitas, perlindungan dan penanggulangan masalah sosial melalui :



1. Perhatian terhadap masalah kualitas perlindungan, pelayanan, dan jaminan sosial, termasuk pengembangan sistem perlindungan sosial yang terpadu, yang mampu menjangkau seluruh masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
3. Perbaiki kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan peran serta berbagai komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan;
5. Mengupayakan kebijakan-kebijakan yang mendukung dalam penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial.

Adapun faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Sosial Daerah yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari Kebijakan Daerah, antara lain :

- a. Penyediaan sarana dan prasarana dasar serta rumah layak huni
- b. Menurunkan angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dengan memberikan bantuan sosial dan penanganan PMKS
- c. Menurunkan jumlah kemiskinan dengan melakukan pendidikan dan pelatihan dan bantuan dana usaha untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin
- d. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, menurunkan pengaruh negatif media terhadap pembentukan kepribadian anak, serta meningkatkan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender anak.



Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, meningkatkan peran perempuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan sosial.

Adapun pembagian kewenangan bidang sosial antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten adalah sebagai berikut :



Tabel 3.2.1  
Pembagian Kewenangan Bidang Sosial

No	Sub Bidang	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten
1	Pemberdayaan Sosial	<ul style="list-style-type: none"><li>b. Penetapan lokasi dan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT).</li><li>c. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah provinsi.</li><li>d. Pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</li><li>c. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi.</li><li>d. Pemberdayaan sosial KAT.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan</li><li>b. dalam Daerah kabupaten/kota.</li><li>c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota.</li><li>d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota.</li></ul>
2	Penanganan Warga Negara Migran korban kekerasan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi sampai ke Daerah provinsi asal.</li><li>b. Pemulihan trauma korban tindak kekerasan (<i>trafficking</i>) dalam dan luar negeri.</li></ul>	<p>Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/kota asal.</p>	<p>Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/ kelurahan asal.</p>



3	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> .	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang memerlukan rehabilitasi pada panti.	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan <i>Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antara WNI dengan WNA.</li><li>b. Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan.</li><li>c. Pengelolaan data fakir miskin nasional.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.</li><li>b. Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah provinsi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pemeliharaan anak-anak terlantar.</li><li>b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota.</li></ul>
5	Penanganan Bencana	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana nasional.</li><li>b. Pembuatan model pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana</li></ul>	Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi.	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota.</li><li>b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/ kota</li></ul>



---

6	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional utama dan makam pahlawan nasional di dalam dan luar negeri.	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi.	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota.
7	Sertifikasi dan Akreditasi	a. Pemberian setifikasi kepada pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial. b. Pemberian akreditasi kepada lembaga kesejahteraan sosial.		

---



### 3.3 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Tujuan yang ditetapkan adalah untuk memberi batasan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari Misi yang telah digariskan. Tujuan ini merupakan suatu target yang ingin dicapai Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain :

- a. Meningkatkan upaya perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- c. Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
- d. Meningkatkan upaya pengurangan resiko bencana.
- e. Meningkatkan mutu, keterjangkauan dan profesionalitas pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Sasaran jangka pendek yang ingin dicapai adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang diperkirakan dapat dicapai pada tahun 2018 adalah :

1. Meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan pada umumnya;
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sosial;
3. Berkembangnya kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam rangka perlindungan, jaminan, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial;
4. Meningkatnya penanganan Penyandang masalah kesejahteraan sosial.



### **3.4 Program dan Kegiatan**

Dalam upaya mencapai Visi dan Misi, maka Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan membuat Usulan Program sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Sosial Daerah tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan kondisi serta permasalahan yang dihadapi saat ini maka Dinas Sosial Daerah menyusun rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2018 sebagai berikut :

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini bertujuan mewujudkan kualitas sumberdaya manusia organisasi perangkat daerah Dinas Sosial Daerah. Sedangkan sasaran program ini adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia OPD Dinas Sosial Daerah. Adapun prioritas kegiatan-kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebagai berikut :

- Penyediaan jasa surat-menyurat  
Sasaran kegiatan ini adalah ASN OPD Dinas Sosial Daerah
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  
Sasaran kegiatan ini adalah ASN OPD Dinas Sosial Daerah
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional  
Sasaran kegiatan ini adalah ASN OPD Dinas Sosial Daerah
- Penyediaan alat tulis kantor  
Sasaran kegiatan ini adalah ASN OPD Dinas Sosial Daerah
- Penyediaan barang cetakan dan pengadaan  
Sasaran kegiatan ini adalah ASN OPD Dinas Sosial Daerah
- Penyediaan komponen instalasi listrik bangunan kantor  
Sasaran kegiatan ini adalah ASN OPD Dinas Sosial Daerah
- Penyediaan peralatan rumah tangga  
Sasaran kegiatan ini adalah ASN OPD Dinas Sosial Daerah



- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  
Sasaran kegiatan ini adalah ASN OPD Dinas Sosial Daerah
- Penyediaan makanan dan minuman  
Sasaran kegiatan ini adalah ASN OPD Dinas Sosial Daerah
- Rapat-rapat konsultasi dan kordinasi ke luar daerah  
Sasaran kegiatan ini adalah ASN OPD Dinas Sosial Daerah
- Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah  
Sasaran kegiatan ini adalah ASN OPD Dinas Sosial Daerah
- Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran  
Sasaran kegiatan ini adalah ASN OPD Dinas Sosial Daerah

## 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pengelolaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan kerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan. Sedangkan sasaran program ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia OPD Dinas Sosial Daerah. Adapun Kegiatan – kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebagai berikut :

- Pengadaan kendaraan dinas/operasional  
Sasaran kegiatan ini adalah ASN OPD Dinas Sosial Daerah
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor  
Sasaran kegiatan ini adalah ASN OPD Dinas Sosial Daerah
- Pengadaan peralatan gedung kantor  
Sasaran kegiatan ini adalah ASN OPD Dinas Sosial Daerah
- Pengadaan meubelair  
Sasaran kegiatan ini adalah ASN OPD Dinas Sosial Daerah
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional  
Sasaran kegiatan ini adalah ASN OPD Dinas Sosial Daerah
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor  
Sasaran kegiatan ini adalah ASN OPD Dinas Sosial Daerah



3. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan. Sedangkan sasaran program ini adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia OPD Dinas Sosial Daerah. Adapun Kegiatan – kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebagai berikut :

- Pendidikan dan Pelatihan Formal  
Sasaran kegiatan ini adalah ASN OPD Dinas Sosial Daerah

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Selatan. Sedangkan sasaran program ini adalah Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia OPD Dinas Sosial Daerah. Adapun Kegiatan – kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebagai berikut :

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD  
Sasaran kegiatan ini adalah ASN OPD Dinas Sosial Daerah
- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun  
Sasaran kegiatan ini adalah ASN OPD Dinas Sosial Daerah

5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Lainnya

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, Komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Lainnya. Adapun sasaran program ini adalah mewujudkan standar hidup layak bagi PMKS. Adapun



Kegiatan – kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya. Sasaran kegiatan ini adalah peserta kegiatan sosialisasi, petugas dan pendamping
- Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin  
Sasaran kegiatan ini adalah peserta kegiatan manajemen usaha
- Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial  
Sasaran kegiatan ini adalah peserta kegiatan pelatihan di Panti Asuhan/jompo
- Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Tim PMKS dan Pemberian Bantuan ke panti sosial  
Sasaran kegiatan ini penghuni panti asuhan dan panti jompo

#### 6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial masyarakat. Sedangkan sasaran program ini adalah mewujudkan standar hidup layak bagi PMKS. Adapun Kegiatan–kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebagai berikut :

- Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak  
Sasaran kegiatan ini adalah korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak.
- Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)  
Sasaran kegiatan ini adalah Penyandang masalah kesejahteraan sosial dan keluarga
- Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan



Sasaran kegiatan ini adalah keluarga penerima manfaat bansos rastra (beras sejahtera)

- Pembinaan/Monitoring Program Keluarga Harapan  
Sasaran kegiatan ini keluarga penerima manfaat program keluarga harapan
- Pelatihan Taruna Siaga Bencana (Tagana)  
Sasaran kegiatan ini adalah Peserta pelatihan taruna siaga bencana (tagana)

#### 7. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan terhadap para penyandang cacat dan trauma. Sedangkan sasaran program ini adalah Meningkatkan kualitas hidup layak PMKS yang tertangani. Adapun Kegiatan – kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebagai berikut :

- Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan  
Sasaran kegiatan ini adalah penyandang cacat dan penyakit kejiwaan
- Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma  
Sasaran kegiatan ini adalah penyandang cacat dan eks trauma

#### 8. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan bagi panti asuhan/jompo dalam memenuhi kebutuhan dasar dan lebih mandiri. Sedangkan sasaran program ini adalah meningkatkan kualitas hidup layak PMKS yang tertangani. Adapun kegiatan-kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebagai berikut:

- Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo  
Sasaran kegiatan ini adalah penghuni panti sosial



9. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)

Program ini bertujuan untuk pembinaan eks penyandang penyakit sosial khususnya dan PMKS pada umumnya pelatihan, monitoring dan evaluasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan lebih mandiri. Sedangkan sasaran program ini adalah meningkatkan kualitas hidup layak PMKS yang tertangani. Adapun kegiatan-kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebagai berikut :

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  
Sasaran kegiatan ini adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial

10. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial. Sedangkan sasaran program kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas hidup layak PMKS yang tertangani. Adapun Kegiatan – kegiatan yang terdapat pada program ini adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat  
Sasaran kegiatan ini adalah pelaku usaha dengan lembaga kesejahteraan sosial
- Pelestarian nilai - nilai kesetiakawanan  
Sasaran kegiatan ini adalah ASN dan Ormas Kemasyarakatan





1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor (Bulan)	Kab. Tapanuli Selatan	12 Bulan	15,000,000	12 Bulan	13,080,000	(1,920,000)	Pengurangan biaya pembelian roundup	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar kantor/majalah dinas (Bulan)	Kab. Tapanuli Selatan	12 Bulan	20,000,000	12 Bulan	20,000,000	-		
1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat kantor (Kotak)	Kab. Tapanuli Selatan	465 Kotak	12,900,000	465 Kotak	12,900,000	-		
1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (OH)	Kab. Tapanuli Selatan	133 OH	179,907,500	233 OH	317,102,500	137,195,000	Pertambahan dana untuk memenuhi kebutuhan dalam hal koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (OH)	Kab. Tapanuli Selatan	360 OH	94,650,000	360 OH	94,650,000	-		
1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya pelayanan jasa THL 6 orang, pejabat pengadaan barang jasa 1 orang, tim penerima hasil pekerjaan 3 orang, bendahara pengeluaran 1 orang, bendahara pembantu juru bayar 1 orang, bendahara pembantu pembukuan 1 orang, pembantu pengurus barang pengguna 1 orang (%)	Kab. Tapanuli Selatan	100%	262,965,816	100%	296,017,452	33,051,636	Pertambahan untuk memenuhi kebutuhan tenaga entri data dalam peningkatan kualitas data dan administrasi dinas	
																		-	
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Program Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum Bidang Kemasyarakatan</b>	<b>Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan (%)</b>		<b>33%</b>	<b>-</b>	<b>33%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Peringatan HUT Tapanuli Selatan	Terselenggaranya pameran pembangunan OPD Dinas dalam rangka HUT Tapanuli Selatan (kali)	Kab. Tapanuli Selatan	1 Kali	-	1 Kali	-	-		
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya (%)</b>		<b>100%</b>	<b>775,448,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,161,468,648</b>	<b>386,020,648</b>		
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Pengadaan Kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional (Unit)	Kab. Tapanuli Selatan	1 Unit	410,000,000	2 Unit	720,000,000	310,000,000	Pertambahan untuk memenuhi kebutuhan dana pengadaan kendaraan operasional (mobil toilet)	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (unit)	Kab. Tapanuli Selatan	12 Unit	156,000,000	12 Unit	164,500,000	8,500,000	Pertambahan untuk kebutuhan dekorasi dan bahan pameran HUT Tapsel	



1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (unit)	Kab. Tapanuli Selatan	8 Unit	58,000,000	9 Unit	72,527,544	14,527,544	Penambahan printer A3, Pemindahan satelit PKH untuk memenuhi kebutuhan fasilitas dinas
1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Pengadaan Meubelair	Tersedianya meubelair kantor (unit)	Kab. Tapanuli Selatan	7 Unit	80,224,048	10 Unit	84,562,648	4,338,600	Penambahan meja 1/2 biro untuk memenuhi kebutuhan fasilitas dinas
1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Brankas 1 Unit, Lemari kabinet 1 unit, Filling kabinet 8 unit, laptop 12 unit, printer 7 unit, kursi kerja 26 unit, kamera EOS 1 unit, proyektor 1 unit, sound system 1 unit, TV LED 2 unit, kulkas 2 unit (unit)	Kab. Tapanuli Selatan	-	-	-	-	-	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor (Bulan)	Kab. Tapanuli Selatan	12 Bulan	-	12 Bulan	-	-	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional (Bulan)	Kab. Tapanuli Selatan	12 Bulan	65,723,952	12 Bulan	114,378,456	48,654,504	Penambahan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas kadis
1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	5	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor (Bulan)	Kab. Tapanuli Selatan	-	-	-	-	-	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	7	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor (Bulan)	Kab. Tapanuli Selatan	12 Bulan	5,500,000	12 Bulan	5,500,000	-	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3	Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional	Telah diperbaikinya kendaraan dinas/ operasional (Unit)	Kab. Tapanuli Selatan	-	-	-	-	-	
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)</b>		<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian dan tenun daerah (Stel)	Kab. Tapanuli Selatan	-	-	-	-	-	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian olah raga dan pakaian lapangan (Stel)	Kab. Tapanuli Selatan	80 Stel	-	80 Stel	-	-	
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Fungsional (Orang)</b>		<b>20 orang</b>	<b>30,000,000</b>	<b>20 orang</b>	<b>14,000,000</b>	<b>(16,000,000)</b>	
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	4 Orang	30,000,000	2 Orang	14,000,000	(16,000,000)	Pengurangan perjalanan luar daerah dan biaya bimtek





1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah kepala keluarga yang menerima sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin (kepala keluarga)	Kab. Tapanuli Selatan	-	-	-	-	-	-	
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi PMKS (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	1 Pelatihan; 10 Orang	70,000,000	1 Pelatihan; 10 Orang	70,000,000	-	-	
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pembinaan dan Peningkatan Kinerja tim PMKS dan Pemberian bantuan ke panti Sosial	Jumlah panti asuhan/ jompo yang mendapatkan bantuan sosial (panti)	Kab. Tapanuli Selatan	8 panti	118,705,600	8 panti	118,705,600	-	-	
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial (%)</b>	<b>Kab. Tapanuli Selatan</b>	<b>37%</b>	<b>434,975,000</b>	<b>37%</b>	<b>1,144,206,720</b>	<b>709,231,720</b>		
											<b>Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)</b>		<b>93,29%</b>		<b>93,29%</b>				
											<b>Indeks Gini Rasio</b>		<b>&lt;3,00</b>		<b>&lt;3,00</b>				
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	Terselenggaranya fasilitasi pemberian bantuan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	10 Orang	19,975,000	10 Orang	19,975,000	-	-	
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Terselenggaranya pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS serta fasilitasi konsultasi bagi keluarga pada LK3 (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	20 Orang; 50 Orang	50,000,000	20 Orang; 50 Orang	46,169,000	(3,831,000)	Pergeseran biaya pengganti transport fasilitasi LK3 ke pengganti transport peserta sosialisasi LK3; ATK; dan perjalanan dinas dalam daerah karena permintaan untuk fasilitasi LK3 tidak ada dari kecamatan	
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal	Jumlah peserta pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	-	-	-	-	-	-	
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pembentukan Pusat Informasi Penyandang Cacat dan Trauma Center	Tersedianya pusat informasi penyandang cacat dan trauma center (unit)	Kab. Tapanuli Selatan	-	-	-	-	-	-	



1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	jumlah orang yang memperoleh bantuan bagi PMKS (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya- Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Meningkatnya perencanaan, pemutakhiran data, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi, serta penanganan pengaduan bantuan sosial rastra (%)	Kab. Tapanuli Selatan	70%	-	70%	619,462,720	619,462,720			Pertambahan kegiatan untuk penyaluran bantuan sosial Rastra	
1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	Pembinaan/ monitoring Program Keluarga Harapan	jumlah keluarga penerima manfaat yang termonitoring pada PKH (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	60 orang, 1 Dokumen	270,000,000	60 orang, 1 Dokumen	363,600,000	93,600,000			Pertambahan tali asih bagi pendamping PKH sebanyak 26 orang	
1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	Pelatihan Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Jumlah peserta pelatihan taruna siaga bencana (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	15 Orang	95,000,000	15 Orang	95,000,000	-				
1	0	0	1	0	0	0	0	1	7	<b>Program Pembinaan Anak Terlantar</b>	<b>Persentase penanganan anak terlantar (%)</b>	<b>Kab. Tapanuli Selatan</b>	<b>24%</b>	<b>-</b>	<b>24%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
											<b>Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum</b>		<b>0.31</b>		<b>0.31</b>						
											<b>Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu (P2TP2A) (%)</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>						
											<b>Persentase tenaga kerja di bawah umur (%)</b>		<b>0%</b>		<b>0%</b>						
											<b>Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)</b>		<b>93,29%</b>		<b>93,29%</b>						
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Penampungan Anak Terlantar	Tersedianya sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar (Unit)	Kab. Tapanuli Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Penyusunan Data dan Analisis Permasalahan Anak Terlantar	Tersusunnya dokumen analisis permasalahan anak terlantar (dokumen)	Kab. Tapanuli Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah tenaga pembinaan anak terlantar pada pelatihan keterampilan (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	-	-	-	-	-	-	-
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	<b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</b>	<b>Persentase Penanganan para penyandang cacat dan trauma ( %)</b>		24%	230,600,000	24%	230,600,000	-	-	-
											<b>Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum</b>		0.31		0.31				
											<b>Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh Petugas Terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu (P2TP2A) (%)</b>		100%		100%				
											<b>Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)</b>		93.29%		93.29%				
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan	Tersusunnya dokumen penyandang cacat dan penyakit kejiwaan (Dokumen)	Kab. Tapanuli Selatan	1 Dokumen	130,600,000	1 Dokumen	130,600,000	-	-	-
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perawatan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Tersedianya sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma (unit)	Kab. Tapanuli Selatan	-	-	-	-	-	-	-
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Jumlah peserta pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	15 Orang	100,000,000	15 Orang	100,000,000	-	-	-
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah peserta penyandang cacat dan eks trauma yang diberdayagunakan (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	-	-	-	-	-	-	-
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatihan dan Pendidik	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan keterampilan bagi tenaga pelatihan dan pendidik (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	-	-	-	-	-	-	-
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	<b>Program pembinaan panti asuhan/ jompo</b>				70,000,000		40,020,000	(29,980,000)		
											<b>Sarana sosial panti asuhan (unit)</b>	Kab. Tapanuli Selatan	4 unit		4 unit				
											<b>Sarana sosial panti jompo (unit)</b>	Kab. Tapanuli Selatan	4 unit		4 unit				



1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo	Tersedianya sarana dan prasarana panti asuhan/jompo (unit)	Kab. Tapanuli Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo	Meningkatnya penyelenggaraan panti asuhan/jompo (%)	Kab. Tapanuli Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo	Jumlah penghuni panti yang menjadi peserta pelatihan (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	30 Orang	70,000,000	30 Orang	40,020,000	(29,980,000)		Pengurangan dalam hal rasionalisasi kegiatan	
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatihan dan Pendidik	Jumlah peserta peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik bagi penghuni panti asuhan/jompo (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)</b>	<b>Persentase penanganan eks penyandang penyakit sosial (%)</b>		<b>24%</b>	<b>155,000,000</b>	<b>24%</b>	<b>155,000,000</b>		<b>-</b>		
											<b>Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)</b>		<b>93,29%</b>		<b>93,29%</b>					
1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Pembangunan Pusat Bimbingan/ Konseling Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Tersedianya pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial (unit)	Kab. Tapanuli Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang diberdayakan (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya sosialisasi dan pemutakhiran data-data sosial, pembangunan aplikasi sistem data terpadu kesejahteraan sosial, pembangunan website serta dokumen profil PMKS di Kab. Tapanuli Selatan (%)	Kab. Tapanuli Selatan	70% = 20 orang, 1 Dokumen, 1 Aplikasi, 1 website, 1 Dokumen	155,000,000	70% = 20 orang, 1 Dokumen, 1 Aplikasi, 1 website, 1 Dokumen	155,000,000		-		
1	0	0	1	0	0	0	0	2	1	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Jumlah karang taruna yang telah dibina</b>		<b>3 karang taruna</b>	<b>50,000,000</b>	<b>3 karang taruna</b>	<b>83,811,000</b>	<b>33,811,000</b>			





Adapun alasan rencana perubahan pagu indikatif tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Untuk memenuhi target program sebesar 100%, pada kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  
Pengurangan anggaran pada kegiatan ini merupakan rasionalisasi kegiatan pada biaya telepon, biaya air, dan meteran air
2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  
Pengurangan anggaran sebagai bentuk rasionalisasi kegiatan pada blanko kuitansi, blanko order pembelian dan blanko SPPD
3. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor  
Pengurangan anggaran dilakukan pada biaya pembelian kabel 1x1,5 m dan 1x2,5 m
4. Penyediaan peralatan rumah tangga  
Pengurangan anggaran pada biaya pembelian roundup
5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah  
Pertambahan anggaran, karena dana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan perjalanan luar daerah
6. Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran  
Pertambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan THL sebanyak 2 orang dalam meningkatkan kualitas administrasi dinas

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Untuk memenuhi target program sebesar 100%, pada kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional  
Penambahan anggaran untuk pengadaan kendaraan operasional toilet portable
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor  
Penambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan dana dekorasi dan bahan pameran HUT Tapanuli Selatan



3. Pengadaan peralatan gedung kantor  
Penambahan anggaran untuk pembelian printer A3 dan biaya pemindahan satelit PKH ke kantor Dinas
  4. Pengadaan meubelair  
Penambahan anggaran untuk pengadaan meja ½ biro untuk memenuhi kebutuhan meubelair dinas
  5. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional  
Penambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan biaya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  
Untuk meningkatkan kualitas ASN, pada kegiatan sebagai berikut :
1. Pendidikan dan pelatihan formal  
Pengurangan anggaran biaya perjalanan luar daerah dan biaya bimtek
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  
Untuk memenuhi target program yaitu 100%, pada kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan  
Pengurangan anggaran lembur ASN dan Non PNS
  2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun  
Penambahan anggaran lebur ASN dan Non PNS
- e. Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  
Untuk memenuhi target program yaitu persentase PMKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial sebesar 37%, pada kegiatan sebagai berikut :



1. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan (PMKS)  
Pengurangan anggaran untuk rasionalisasi kegiatan dengan pengurangan biaya sewa ruang pertemuan
  2. Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan  
Penambahan anggaran dengan penambahan biaya angkut menjadi Rp.150/Kg dengan jenis bantuan beras kualitas medium sebanyak 10 kg per bulan
  3. Pembinaan/ monitoring Program Keluarga Harapan  
Penambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan tali asih bagi pendamping PKH sebanyak 26 orang
- f. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo  
Untuk memenuhi pembinaan panti asuhan dan panti jompo, pada kegiatan sebagai berikut :
1. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo  
Pengurangan anggaran sebagai bentuk rasionalisasi kegiatan sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana
- g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial  
Untuk memenuhi target program yaitu jumlah karang taruna yang terbina sebesar 3 karang taruna, pada kegiatan sebagai berikut :
1. Pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan  
Pertambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember untuk memperingati hari kesetiakawanan sosial



3.4.2  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Daerah Tahun 2018  
Dan Prakiraan Maju Tahun 2019  
Kabupaten Tapanuli Selatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>URUSAN WAJIB</b>								
	<b>BIDANG SOSIAL</b>								
1 1 6 1 0 1	<b>DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN</b>				4,149,062,720	APBD			2,588,125,000
1 1 6 1 0 0 0 0 0 1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)</b>	0	100%	873,024,952	APBD		100%	756,744,585
1 1 6 1 0 0 0 0 0 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya jasa surat - menyurat SKPD (Benda Pos)	Kab. Tapanuli Selatan	165 Benda Pos	990,000	APBD		150 Benda Pos	1,025,000
1 1 6 1 0 0 0 0 0 1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening listrik, telepon dan wifi (Bulan)	Kab. Tapanuli Selatan	12 Bulan	35,000,000	APBD		12 Bulan	41,000,000







1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional	Telah diperbaikinya kendaraan dinas/ operasional (Unit)	Kab. Tapanuli Selatan	-	0	APBD	1 unit	-
1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Aparatur pemerintahan yang memenuhi disiplin dalam melaksanakan tugas (%)</b>		100%	0	APBD	100%	51,250,000
1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian dan tenun daerah (Stel)	Kab. Tapanuli Selatan	0%	0	APBD	39 stel PDH; 39 stel tenun daerah	-
1	0	0	1	0	0	0	0	0	5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian olah raga dan pakaian lapangan (Stel)	Kab. Tapanuli Selatan	80 Stel	0	APBD	40 Stel pakaian olah raga dan 40 stel pakaian lapangan	51,250,000.00
1	0	0	1	0	0	0	0	0	5	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Fungsional (Orang)</b>		20 orang	14,000,000	APBD	9 Orang	71,750,000
1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	2 Orang	14,000,000	APBD	9 Orang	71,750,000
1	0	0	1	0	0	0	0	0	6	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)</b>		100%	77,225,800	APBD	100%	102,500,000
1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD, lakip, laporan keuangan akhir tahun, renja, perubahan renja, RKA, Perubahan RKA, revisi renstra 2016-2021, ranwal renstra 2022-2026 (Dokumen)	Kab. Tapanuli Selatan	6 Dokumen = Lakip, Renja, Perubahan Renja, RKA, Perubahan RKA, Revisi Renstra 2016-2021	54,918,800	APBD	5 Dokumen = Lakip, Renja, Perubahan Renja, RKA, Perubahan RKA	98,000,000
1	0	0	1	0	0	0	0	0	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun serta laporan penerimaan dan pengeluaran Dinas (Dokumen)	Kab. Tapanuli Selatan	2 Dokumen = Laporan Keuangan akhir tahun serta laporan penerimaan dan pengeluaran Dinas	22,307,000	APBD	2 Dokumen = Laporan Keuangan akhir tahun serta laporan penerimaan dan pengeluaran Dinas	4,500,000



1	0	0	1	0	0	0	0	1		<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	<b>Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)</b>		93%	369,705,600	APBD		93,62%	378,948,240
											<b>Sarana sosial panti jompo (unit)</b>		4					
											<b>Sarana sosial panti asuhan (unit)</b>		4					
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah peserta sosialisasi, petugas dan pendamping yang mengikuti sosialisasi (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	100 orang = 50 Orang ; 50 orang	151,000,000	APBD		110 orang = 60 Orang ; 50 orang	154,775,000
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah peserta keluarga miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	0%	0	APBD		1 Pelatihan; 10 Orang	0
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah kepala keluarga yang terfasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin (kepala keluarga)	Kab. Tapanuli Selatan	20 Kepala Keluarga	30,000,000	APBD		20 Kepala Keluarga	30,750,000
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah kepala keluarga yang menerima sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin (kepala keluarga)	Kab. Tapanuli Selatan	0%	0	APBD		30 Kepala Keluarga	0
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah peserta pelatihan keterampilan bagi PMKS (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	1 Pelatihan; 10 Orang	70,000,000	APBD		1 Pelatihan; 10 Orang	71,750,000
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pembinaan dan Peningkatan Kinerja tim PMKS dan Pemberian bantuan ke panti Sosial	Jumlah panti asuhan/ jompo yang mendapatkan bantuan sosial (panti)	Kab. Tapanuli Selatan	8 panti	118,705,600	APBD		8 panti	121,673,240
1	0	0	1	0	0	0	0	1		<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial (%)</b>	<b>Kab. Tapanuli Selatan</b>	37%	1,144,206,720	APBD		39%	515,875,000
											<b>Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)</b>		93,29%					
											<b>Indeks Gini Rasio</b>		<3,00					
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	Terselenggaranya fasilitasi pemberian bantuan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	10 Orang	19,975,000	APBD		10 Orang	20,500,000.00



1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Terselenggaranya pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS serta fasilitasi konsultasi bagi keluarga pada LK3 (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	20 Orang; 50 Orang	46,169,000	APBD		25 Orang; 50 Orang	51,250,000.00
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal	Jumlah peserta pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	0%	0	APBD		1 Pelatihan; 10 Orang	-
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pembentukan Pusat Informasi Penyandang Cacat dan Trauma Center	Tersedianya pusat informasi penyandang cacat dan trauma center (unit)	Kab. Tapanuli Selatan	-	0	APBD		-	-
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	jumlah orang yang memperoleh bantuan bagi PMKS (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	0%	0	APBD		50 Orang	-
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	Meningkatnya perencanaan, pemutakhiran data, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi, serta penanganan pengaduan bantuan sosial rastra (%)	Kab. Tapanuli Selatan	70%	619,462,720	APBD		73%	70,000,000.00
1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	Pembinaan/ monitoring Program Keluarga Harapan	jumlah keluarga penerima manfaat yang termonitoring pada PKH (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	60 orang, 1 Dokumen	363,600,000	APBD		60 orang, 1 Dokumen	276,750,000.00
1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	Pelatihan Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Jumlah peserta pelatihan taruna siaga bencana (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	15 Orang	95,000,000	APBD		15 Orang	97,375,000.00
1	0	0	1	0	0	0	0	1	7	<b>Program Pembinaan Anak Terlantar</b>	<b>Persentase penanganan anak terlantar (%)</b>	<b>Kab. Tapanuli Selatan</b>	<b>24%</b>	<b>0</b>	<b>APBD</b>		<b>26%</b>	<b>0</b>
											<b>Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum</b>		<b>31%</b>					
											<b>Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu (P2TP2A) (%)</b>		<b>100%</b>					
											<b>Persentase tenaga kerja di bawah umur (%)</b>		<b>0%</b>					





1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah peserta penyandang cacat dan eks trauma yang diberdayakan (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	0%	0	APBD	15 Orang	-
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatihan dan Pendidik	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan keterampilan bagi tenaga pelatihan dan pendidik (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	0%	0	APBD	12 Orang	-
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	<b>Program pembinaan panti asuhan/ jompo</b>				<b>40,020,000</b>	<b>APBD</b>		<b>71,750,000</b>
											Sarana sosial panti asuhan (unit)	Kab. Tapanuli Selatan	4 unit			4 unit	
											Sarana sosial panti jompo (unit)	Kab. Tapanuli Selatan	4 unit			4 unit	
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo	Tersedianya sarana dan prasarana panti asuhan/jompo (unit)	Kab. Tapanuli Selatan	0%	0	APBD	-	0
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo	Meningkatnya penyelenggaraan panti asuhan/jompo (%)	Kab. Tapanuli Selatan	0%	0	APBD	-	0
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo	Jumlah penghuni panti yang menjadi peserta pelatihan (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	30 Orang	40,020,000	APBD	30 Orang	71,750,000
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatihan dan Pendidik	Jumlah peserta peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik bagi penghuni panti asuhan/jompo (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	0%	0	APBD	12 Orang	0
1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	<b>Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)</b>	<b>Persentase penanganan eks penyandang penyakit sosial (%)</b>		<b>24%</b>	<b>155,000,000</b>	<b>APBD</b>	<b>26%</b>	<b>88,875,000</b>
											<b>Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)</b>		<b>93,29%</b>				
1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	0%	0	APBD	-	-
1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	Pembangunan Pusat Bimbingan/ Konseling Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Tersedianya pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial (unit)	Kab. Tapanuli Selatan	0%	0	APBD	-	-
1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang diberdayakan (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	0%	0	APBD	10 Orang	-



1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya sosialisasi dan pemutakhiran data-data sosial, pembangunan aplikasi sistem data terpadu kesejahteraan sosial, pembangunan website serta dokumen profil PMKS di Kab. Tapanuli Selatan (%)	Kab. Tapanuli Selatan	70% = 20 orang, 1 Dokumen, 1 Aplikasi, 1 website, 1 Dokumen	155,000,000	APBD	80% = 20 orang, 1 Dokumen, 1 Dokumen	88,875,000.00
1	0	0	1	0	0	0	0	2	1	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Jumlah karang taruna yang telah dibina</b>		<b>3 karang taruna</b>	<b>83,811,000</b>	<b>APBD</b>	<b>3 karang taruna</b>	<b>51,250,000</b>
											<b>Cakupan pelayanan administrasi sosial kemasyarakatan (%)</b>		<b>65%</b>				
											<b>Peresentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)</b>		<b>93,29%</b>				
											<b>Persentase penyelesaian konflik (%)</b>		<b>80%</b>				
1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Tersedianya dokumen kerjasama antara pelaku usaha dengan LK3, pusat bimbingan konseling, dan panti asuhan/jompo (Kerjasama)	Kab. Tapanuli Selatan	6 Kerjasama = 3 Lk3, 1 pusat bimbingan konseling dan 2 panti asuhan/jompo	20,000,000	APBD	6 Kerjasama = 3 Lk3, 1 pusat bimbingan konseling dan 2 panti asuhan/jompo	20,500,000
1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM kesejahteraan sosial dan organisasi masyarakat yang mendapat bantuan fasilitas usaha (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	0%	0	APBD	70 orang; 4 organisasi	0
1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	Penanganan konflik sosial	Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM TKSK dan penanganan kasus di LK3 (orang)	Kab. Tapanuli Selatan	0%	0	APBD	Pelatihan peningkatan SDM TKSK 30 orang dan Penanganan 15 kasus di LK3	0
1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	Pelestarian nilai - nilai kesetiakawanan	Terlestarikannya nilai kepahlawanan, keperintisan masyarakat (Kali)	Kab. Tapanuli Selatan	Terselenggaranya hari kesetiakawanan sosial 20 Desember (1 Kali)	63,811,000	APBD	Terselenggaranya hari kesetiakawanan sosial 20 Desember (1 Kali)	30,750,000



**Tabel 3.4.3**  
**INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL DAERAH**  
**KABUPATEN TAPANULI SELATAN**  
**TAHUN 2018**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1.</b>		<b>Cakupan pelayanan administrasi sosial kemasyarakatan (%)</b>	<b>65%</b>
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	100%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2. Terselenggaranya peningkatan prasarana dan sarana aparatur	100%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	20 Orang
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4. Terpenuhinya kewajiban pelaporan kinerja SKPD	100%
<b>2.</b>		<b>a. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)</b>	<b>93,29%</b>
		<b>b. Sarana sosial panti asuhan (unit)</b>	<b>4 Unit</b>
		<b>c. Sarana sosial panti jompo (unit)</b>	<b>4 Unit</b>
		<b>d. Persentase penanganan PMKS (%)</b>	<b>54%</b>
	Program Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	5. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	93,29%
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	6. Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi sosial (%)	37%
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	7. Persentase penanganan para penyandang cacat dan trauma (%)	24%
	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Jompo	8. Sarana sosial panti asuhan (Unit); Sarana sosial panti jompo (Unit)	4 Unit ; 4 Unit
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)	9. Persentase penanganan eks penyandang penyakit sosial (%)	24%
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	10. Jumlah karang taruna yang telah dibina	3 Karang Taruna



## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018 ini disusun sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Daerah Periode 2016-2021, dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 ini tidak hanya menyangkut langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, akan tetapi mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2018. Adapun Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat. Selain itu dukungan maupun *Political Will* dari pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan Bidang Kesejahteraan Sosial tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan pada umumnya.



# LAMPIRAN



Lampiran 1. Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sumber Dana APBN Tahun 2018

Rumusan Rencana Program dan kegiatan Dinas Sosial Daerah Tahun 2018  
Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Tapanuli Selatan  
Sumber Dana APBN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		Hasil Desk TA. 2018			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sangat Prioritas	Prioritas	APBD I	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Sumber Dana APBN</b>													
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Sosial				35,837,500,000				44,796,875,000	35,837,500,000			
	1 5 Program Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya				3,937,500,000				4,921,875,000	3,937,500,000			
	0 4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin				3,937,500,000				4,921,875,000	3,937,500,000			



			1	Pembinaan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Jumlah rehabilitasi rumah tidak layak huni	Kabupaten Tapanuli Selatan	200 Kepala Keluarga	3,750,000,000	APBN	-	200 Kepala Keluarga	4,687,500,000	3,750,000,000	-	-	APBN
			2	Pembinaan dan Pemberian Bantuan Bagi Keluarga Rentan	Jumlah terbina dan terberdayanya keluarga rentan	Kabupaten Tapanuli Selatan	30 Kepala Keluarga	187,500,000	APBN	-	30 Kepala Keluarga	234,375,000	187,500,000	-	-	APBN
			<b>16</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>				<b>30,150,000,000</b>				<b>37,687,500,000</b>	<b>30,150,000,000</b>			
			<b>07</b>	<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS</b>				<b>2,025,000,000</b>				<b>2,531,250,000</b>	<b>2,025,000,000</b>			
			3	Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)	Jumlah asistensi lanjut usia terlantar	Kabupaten Tapanuli Selatan	250 Orang	1,125,000,000	APBN	-	250 Orang	1,406,250,000	1,125,000,000	-	-	APBN
			4	Asistensi Orang dengan Kecacatan Berat (ASODK Berat)	Jumlah asistensi terhadap orang dengan kecacatan berat	Kabupaten Tapanuli Selatan	200 Orang	900,000,000	APBN	-	200 Orang	1,125,000,000	900,000,000	-	-	APBN
			<b>12</b>	<b>Pembinaan/Monitoring Program Keluarga Harapan</b>				<b>28,125,000,000</b>				<b>35,156,250,000</b>	<b>28,125,000,000</b>			
			5	Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah keluarga dalam pemberdayaan keluarga harapan	Kabupaten Tapanuli Selatan	8.000 Kepala Keluarga	26,250,000,000	APBN	-	8.000 Kepala Keluarga	32,812,500,000	26,250,000,000	-	-	APBN



			6	Pendamping, Operator, dan Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah pendamping, operator dan koordinator pada Program Keluarga Harapan	Kabupaten Tapanuli Selatan	35 Orang	1,875,000,000	APBN	-	35 Orang	2,343,750,000	1,875,000,000	-	-	APBN
			21	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>				<b>1,750,000,000</b>				<b>2,187,500,000</b>	<b>1,750,000,000</b>			
			03	<b>Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat</b>				<b>1,750,000,000</b>				<b>2,187,500,000</b>	<b>1,750,000,000</b>			
			7	Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin	Jumlah masyarakat miskin berkurang	Kabupaten Tapanuli Selatan	700 Kepala Keluarga	1,750,000,000	APBN	-	700 Kepala Keluarga	2,187,500,000	1,750,000,000	-	-	APBN
<b>Total APBN</b>								<b>35,837,500,000</b>				<b>44,796,875,000</b>	<b>35,837,500,000</b>			



Lampiran 2. Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Rumusan Rencana Program dan kegiatan Dinas Sosial Daerah Tahun 2018  
Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Tapanuli Selatan  
Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		Hasil Desk TA. 2018			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sangat Prioritas	Prioritas	APBD I	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara</b>													
					9,270,000,000				11,587,500,000	9,270,000,000			
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Sosial												
15	Program Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya				4,790,000,000				5,987,500,000	4,790,000,000			



				<b>01</b>	<b>Peningkatan Kemampuan (<i>Capacity Building</i>) Pugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>				<b>300,000,000</b>				<b>375,000,000</b>	<b>300,000,000</b>			
				1	Pemantapan bagi pekerja sosial masyarakat	Jumlah pekerja sosial masyarakat	Kabupaten Tapanuli Selatan	45 Orang	200,000,000	APBD I	-	45 Orang	250,000,000	200,000,000	-	APBD I	
				2	Pemantapan bagi TKSK	Jumlah TKSK	Kabupaten Tapanuli Selatan	14 Orang	100,000,000	APBD I	-	14 Orang	125,000,000	100,000,000	-	APBD I	
				<b>04</b>	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin</b>				<b>4,490,000,000</b>				<b>5,612,500,000</b>	<b>4,490,000,000</b>			
				3	Usaha ekonomi produktif	Jumlah orang yang menerima usaha ekonomi produktif untuk ASLUT	Kabupaten Tapanuli Selatan	120 Orang	240,000,000	APBD I	-	120 Orang	300,000,000	240,000,000	-	APBD I	
				4	Peningkatan kelompok usaha bersama (KUBE)	Jumlah kelompok usaha bersama	Kabupaten Tapanuli Selatan	100 Kelompok	2,000,000,000	APBD I	-	100 Kelompok	2,500,000,000	2,000,000,000	-	APBD I	



				5	Penguatan modal usaha bagi KUMKM dan kelompok usaha	Jumlah kepala keluarga yang memperoleh modal usaha untuk KUMKM dan kelompok usaha	Kabupaten Tapanuli Selatan	800 Kepala Keluarga	2,000,000,000	APBD I	-	800 Kepala Keluarga	2,500,000,000	2,000,000,000	-	APBD I
				6	Penyediaan bantuan pembiayaan perumahan MBR	Jumlah Kepala Keluarga yang memperoleh pembiayaan perumahan MBR	Kabupaten Tapanuli Selatan	60 Kepala Keluarga	250,000,000	APBD I	-	60 Kepala Keluarga	312,500,000	250,000,000	-	APBD I
				<b>16</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>				<b>3,240,000,000</b>				<b>4,050,000,000</b>	<b>3,240,000,000</b>		
				<b>07</b>	<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS</b>				<b>490,000,000</b>				<b>612,500,000</b>	<b>490,000,000</b>		
				7	Bantuan pengobatan untuk ASLUT	Jumlah ASLUT yang menerima pengobatan	Kabupaten Tapanuli Selatan	700 OH	350,000,000	APBD I	-	700 OH	437,500,000	350,000,000	-	APBD I
				8	Bantuan peralatan sekolah	Jumlah anak kurang mampu yang menerima bantuan peralatan sekolah	Kabupaten Tapanuli Selatan	140 Orang	140,000,000	APBD I	-	140 Orang	175,000,000	140,000,000	-	APBD I
				<b>12</b>	<b>Pembinaan/Monitoring Program Keluarga Harapan</b>				<b>150,000,000</b>				<b>187,500,000</b>	<b>150,000,000</b>		



			9	Pelatihan kapasitas peningkatan pendamping program keluarga harapan (PKH)	Jumlah Pendamping PKH	Kabupaten Tapanuli Selatan	35 Orang	150,000,000	APBD I	-	35 Orang	187,500,000	150,000,000	-	APBD I
			<b>13</b>	<b>Pelatihan Taruna Siaga Bencana (Tagana)</b>				<b>2,600,000,000</b>				<b>3,250,000,000</b>	<b>2,600,000,000</b>		
			10	Penyelenggaraan kampung siaga bencana	Jumlah kampung siaga yang berada di kecamatan	Kabupaten Tapanuli Selatan	12 Kecamatan	1,500,000,000	APBD I	-	12 Kecamatan	1,875,000,000	1,500,000,000	-	APBD I
			11	Bantuan pasca bencana	Jumlah kecamatan yang menerima bantuan pasca bencana	Kabupaten Tapanuli Selatan	12 Kecamatan	200,000,000	APBD I	-	12 Kecamatan	250,000,000	200,000,000	-	APBD I
			12	Bantuan pemulihan dan reintegrasi sosial korban bencana	Jumlah kepala keluarga yang mendapat bantuan untuk pemulihan dan reintegrasi sosial korban bencana	Kabupaten Tapanuli Selatan	500 Kepala Keluarga	200,000,000	APBD I	-	500 Kepala Keluarga	250,000,000	200,000,000	-	APBD I
			13	Pengadaan perlengkapan Tagana	Jumlah Tagana yang memperoleh perlengkapan Tagana	Kabupaten Tapanuli Selatan	35 Orang	700,000,000	APBD I	-	35 Orang	875,000,000	700,000,000	-	APBD I
			<b>18</b>	<b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</b>				<b>390,000,000</b>				<b>487,500,000</b>	<b>390,000,000</b>		
			<b>03</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma</b>				<b>390,000,000</b>				<b>487,500,000</b>	<b>390,000,000</b>		



			14	Pelatihan disabilitas sosial	Jumlah disabilitas sosial yang mengikuti pelatihan	Kabupaten Tapanuli Selatan	100 Orang	390,000,000	APBD I	-	100 Orang	487,500,000	390,000,000	-	APBD I
			19	<b>Program Pembinaan Panti Asuhan/Jompo</b>				<b>250,000,000</b>	-	-		<b>312,500,000</b>	<b>250,000,000</b>		
			04	<b>Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo</b>				<b>250,000,000</b>				<b>312,500,000</b>	<b>250,000,000</b>		
			15	Pembinaan panti asuhan dan panti jompo	Jumlah panti asuhan dan panti jompo yang terbina	Kabupaten Tapanuli Selatan	1 Tahun	250,000,000	APBD I	-	1 Tahun	312,500,000	250,000,000	-	APBD I
			21	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>				<b>600,000,000</b>				<b>750,000,000</b>	<b>600,000,000</b>		
			03	<b>Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat</b>				<b>450,000,000</b>				<b>562,500,000</b>	<b>450,000,000</b>		
			16	Pemantapan bagi organisasi sosial dan lembaga kesejahteraan sosial (LKS)	Jumlah organisasi sosial dan lembaga kesejahteraan sosial	Kabupaten Tapanuli Selatan	20 Organisasi	200,000,000	APBD I	-	20 Organisasi	250,000,000	200,000,000	-	APBD I
			17	Penyuluhan SDM Karang Taruna	Jumlah SDM Karang Taruna	Kabupaten Tapanuli Selatan	80 Orang	200,000,000	APBD I	-	80 Orang	250,000,000	200,000,000	-	APBD I
			18	Peningkatan dan pemberdayaan lembaga konsultasi keluarga	Jumlah lembaga konsultasi keluarga	Kabupaten Tapanuli Selatan	1 Lembaga	50,000,000	APBD I	-	1 Lembaga	62,500,000	50,000,000	-	APBD I



				<b>0 6</b>	<b>Pelestarian Nilai-Nilai Kesetiakawanan</b>			<b>150,000,000</b>				<b>187,500,000</b>	<b>150,000,000</b>				
				1 9 .	Penguatan karakter bangsa untuk penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pendahuluan bela negara generasi muda	Kabupaten Tapanuli Selatan	80 Orang	150,000,000	APBD I	-	80 Orang	187,500,000	150,000,000	-	APBD I	
								<b>9,270,000,000</b>				<b>11,587,500,000</b>	<b>9,270,000,000</b>				
<b>Total APBD Provinsi</b>																	



Lampiran 3. Usulan Program Kegiatan Sumber Dana APBN Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2019 Melalui Aplikasi Simlaras

Rumusan Usulan Program Kegiatan Sumber Dana APBN Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2019  
Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

No.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK	URUSAN PEMERINTAHAN	PEMETAAN TERHADAP NOMENKLATUR K/L			INPUT USULAN						
						KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PROGRAM K/L	OUTPUT	NAMA USULAN PROYEK / OUTPUT	TARGET DAERAH	TARGET SATUAN	USULAN PAGU	PROVINSI	NOMOR SURAT BUPATI	DATA PENDUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	LEMBAGA PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA YANG MELAKUKAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	PENGADAAN KENDERAAN OPERASIONAL UNTUK PELAYANAN LK3	1	UNIT	450,000,000	SUMATERA UTARA		
2	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	KORBAN BENCANA ALAM YANG MENDAPATKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR	PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR KORBAN BENCANA ALAM	500	KEPALA KELUARGA	130,000,000	SUMATERA UTARA		
3	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	KORBAN BENCANA SOSIAL YANG MENDAPATKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR	PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR KORBAN BENCANA SOSIAL	150	KEPALA KELUARGA	130,000,000	SUMATERA UTARA		
4	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	MITIGASI DAN PENGUATAN PENYINTAS BENCANA ALAM	LOGISTIK BENCANA DAN BARANG PERLENGKAPAN	13	PAKET	2,000,000,000	SUMATERA UTARA		



5	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PENYANDANG DISABILITAS FISIK, MENTAL, SENSORIK DAN INTELEKTUAL YANG MENDAPAT ALAT BANTU	BANTUAN ALAT BANTU UNTUK PENYANDANG DISABILITAS	6	PAKET	210,875,000	SUMATERA UTARA		
6	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	KPM YANG MEMANFAATKAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DASARNYA	KELOMPOK USAHA BERSAMA	100	KELOMPOK	2,000,000,000	SUMATERA UTARA		
7	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	KPM YANG MEMANFAATKAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DASARNYA	E-WARUNG	100	UNIT	500,000,000	SUMATERA UTARA		
8	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH TERKAIT SPM	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PSKS LEMBAGA YANG MENDAPAT PEMBERDAYAAN	PELATIHAN PENINGKATAN KUALITAS SDM KARANG TARUNA DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN	55	ORANG	308,980,000	SUMATERA UTARA		
9	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH TERKAIT SPM	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	TMPN/TMP/MPN YANG DIREHAB DAN DIPELIHARA	PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1	TMP	100,000,000	SUMATERA UTARA		
10	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH TERKAIT SPM	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	ANAK BALITA TERLANTAR, ANAK TERLANTAR/ ANAK JALANAN, ANAK BERHADAPAN HUKUM, DAN ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN SOSIAL	FASILITASI SAKTI PEKSOS DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN	4	ORANG	202,000,000	SUMATERA UTARA		



11	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH TERKAIT SPM	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	MITIGASI DAN PENGUATAN PENYINTAS BENCANA ALAM	PELATIHAN TARUNA SIAGA BENCANA	24	ORANG	240,000,000	SUMATERA UTARA		
12	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PENGUATAN LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU	PENGELOLAAN VERIFIKASI-VALIDASI BASIS DATA TERPADU	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	KPM YANG MEMANFAATKAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DASARNYA	PENINGKATAN KUALITAS DATA-DATA SOSIAL	80	PERSEN	900,000,000.00	SUMATERA UTARA		
13	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PENGUATAN LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU	FASILITASI PENDAMPINGAN MASYARAKAT	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	SDM YANG TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	HONORARIUM TENAGA KERJA SOSIAL KECAMATAN	30	ORANG	1,160,000,000.00	SUMATERA UTARA		
14	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENGURANGAN KEMISKINAN	PENGUATAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL DAN SUBSIDI TEPAT SASARAN	PENYALURAN BANTUAN TUNAI BERSYARAT SECARA NON TUNAI	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	KELUARGA MISKIN YANG MENDAPAT BANTUAN TUNAI BERSYARAT	PROGRAM KELUARGA HARAPAN	10837	KPM	21,132,150,000	SUMATERA UTARA		
15	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENGURANGAN KEMISKINAN	PENGUATAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL DAN SUBSIDI TEPAT SASARAN	PERLUASAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	KPM YANG MEMANFAATKAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DASARNYA	BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA	17972	KEPALA KELUARGA	2,336,360,000	SUMATERA UTARA		
16	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LAYAK	PENYEDIAAN AKSES HUNIAN LAYAK DAN TERJANGKAU	FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS HUNIAN	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	KPM YANG MEMANFAATKAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DASARNYA	BANTUAN TERHADAP RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	100	KEPALA KELUARGA	3,500,000,000	SUMATERA UTARA		



17	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LAYAK	PENYEDIAAN AKSES AIR MINUM DAN SANITASI LAYAK	PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR SANITASI LAYAK	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	KPM YANG MEMANFAATKAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DASARNYA	REHABILITASI SARANA LINGKUNGAN	100	SARANA	2.500.000,000	SUMATERA UTARA			
<b>TOTAL</b>												<b>37.800.365,000</b>				



Lampiran 4. Usulan Program Kegiatan Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2019 Melalui Aplikasi Simlaras

Rumusan Usulan Program Kegiatan Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara  
Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2019  
Dinas Sosial Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

No.	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK	URUSAN PEMERINTAHAN	PEMETAAN TERHADAP NOMENKLATUR K/L			INPUT USULAN						
						KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PROGRAM K/L	OUTPUT	NAMA USULAN PROYEK / OUTPUT	TARGET DAERAH	TARGET SATUAN	USULAN PAGU	PROVINSI	NOMOR SURAT BUPATI	DATA PENDUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	LEMBAGA PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA YANG MELAKUKAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	PENGADAAN KENDERAAN OPERASIONAL UNTUK PELAYANAN LK3	1	UNIT	450,000,000	SUMATERA UTARA		
2	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	KORBAN BENCANA ALAM YANG MENDAPATKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR	PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR KORBAN BENCANA ALAM	500	KEPALA KELUARGA	130,000,000	SUMATERA UTARA		
3	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	KORBAN BENCANA SOSIAL YANG MENDAPATKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR	PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR KORBAN BENCANA SOSIAL	150	KEPALA KELUARGA	130,000,000	SUMATERA UTARA		
4	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	MITIGASI DAN PENGUATAN PENYINTAS BENCANA ALAM	LOGISTIK BENCANA DAN BARANG PERLENGKAPAN	13	PAKET	2,000,000,000	SUMATERA UTARA		
5	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PENYANDANG DISABILITAS FISIK, MENTAL, SENSORIK DAN INTELEKTUAL YANG MENDAPAT ALAT BANTU	BANTUAN ALAT BANTU UNTUK PENYANDANG DISABILITAS	6	PAKET	210,875,000	SUMATERA UTARA		



6	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	KPM YANG MEMANFAATKAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DASARNYA	KELOMPOK USAHA BERSAMA	100	KELOMPOK	2.000.000,000	SUMATERA UTARA		
7	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	KPM YANG MEMANFAATKAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DASARNYA	E-WARUNG	100	UNIT	500,000,000	SUMATERA UTARA		
8	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH TERKAIT SPM	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PSKS LEMBAGA YANG MENDAPAT PEMBERDAYAAN	PELATIHAN PENINGKATAN KUALITAS SDM KARANG TARUNA DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN	55	ORANG	308.980,000	SUMATERA UTARA		
9	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH TERKAIT SPM	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	TMPN/TMP/MPN YANG DIREHAB DAN DIPELIHARA	PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1	TMP	100,000,000	SUMATERA UTARA		
10	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH TERKAIT SPM	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	ANAK BALITA TERLANTAR, ANAK TERLANTAR/ ANAK JALANAN, ANAK BERHADAPAN HUKUM, DAN ANAK YANG MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN SOSIAL	FASILITASI SAKTI PEKSOS DI KABUPATEN TAPANULI SELATAN	4	ORANG	202,000,000	SUMATERA UTARA		
11	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN TATA KELOLA LAYANAN DASAR	PERCEPATAN PENCAPAIAN SPM DI DAERAH	PENINGKATAN KAPASITAS SDM PELAYANAN DI DAERAH TERKAIT SPM	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	MITIGASI DAN PENGUATAN PENYINTAS BENCANA ALAM	PELATIHAN TARUNA SIAGA BENCANA	24	ORANG	240,000,000	SUMATERA UTARA		
12	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LAYAK	PENYEDIAAN AKSES HUNIAN LAYAK DAN TERJANGKAU	FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS HUNIAN	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	KPM YANG MEMANFAATKAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DASARNYA	BANTUAN TERHADAP RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	100	KEPALA KELUARGA	3,500,000,000	SUMATERA UTARA		



13	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN LAYAK	PENYEDIAAN AKSES AIR MINUM DAN SANITASI LAYAK	PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR SANITASI LAYAK	URUSAN WAJIB	KEMENTERIAN SOSIAL RI	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	KPM YANG MEMANFAATKAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DASARNYA	REHABILITASI SARANA LINGKUNGAN	100	SARANA	2,500,000,000	SUMATERA UTARA	
<b>TOTAL</b>												<b>12,271,855,000</b>		



Lampiran 5. Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan Tahun  
2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019

REKAPITULASI USULAN PROGRAM KEGIATAN  
DINAS SOSIAL DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

No.	Sumber Dana	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2018 (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2019 (Rp.)
1.	APBN	3	7	35.837.500.000	37.800.365.000
2.	APBD Provinsi Sumatera Utara	5	19	9.270.000.000	12.271.855.000
3.	APBD Kabupaten Tapanuli Selatan	10	35	4.149.062.720	4.382.914.000